SKM 2020



Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat









PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TAHUN 2020

Periode Survei: Januari s.d. Desember 2020

NILAI IKM:

84,18

MUTU PELAYANAN : **B**KINERJA PELAYANAN : **BAIK**

PELAYANAN PUBLIK PEMPROV KALBAR

RESPONDEN

JUMLAH: 4.901 Orang

JENIS KELAMIN: L = 2.774 Orang; P = 1.914 Orang; NA = 213 Orang

USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN			
≤ 18 th : 170 orang	SD / MI : 317 orang	PNS : 1.060 orang			
19 – 25 th: 936 orang	SMP / MTs: 399 orang	TNI / POLRI : 93 orang			
26 – 35 th : 1.090 orang	SMA/K/ MA : 1.750 orang	Peg. Swasta : 986 orang			
36 – 45 th : 1.068 orang	D-1/ D-3 : 658 orang	Wiraswasta/Usahawan: 679 orang			
46 – 55 th: 702 orang	D-4 / S-1 : 1.394 orang	Pelajar/Mahasiswa : 825 orang			
≥ 56 th : 327 orang	≥ S-2 : 167 orang	Lainnya : 962 orang			
NA : 608 orang	NA : 216 orang	NA : 296 orang			

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN; MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN PELAYANAN PUBLIK KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT





H. Sutarmidji, SH, M.Hur Gubernur Kalbar

Drs. H. Ria Norsan, MM, MH Wakil Gubernur Kalbar

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

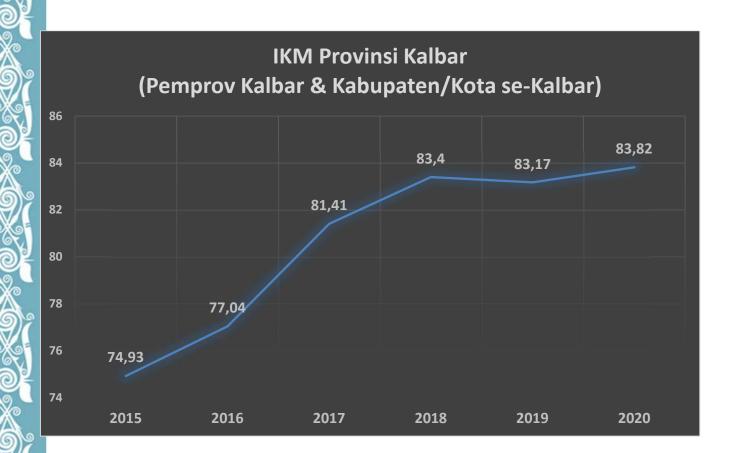
Sebagai upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sasaran yang ingin dicapai pada survei ini adalah mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik, mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan maupun menjadi lebih inovatif dalam penyelengaraan pelayanan publik, sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima.

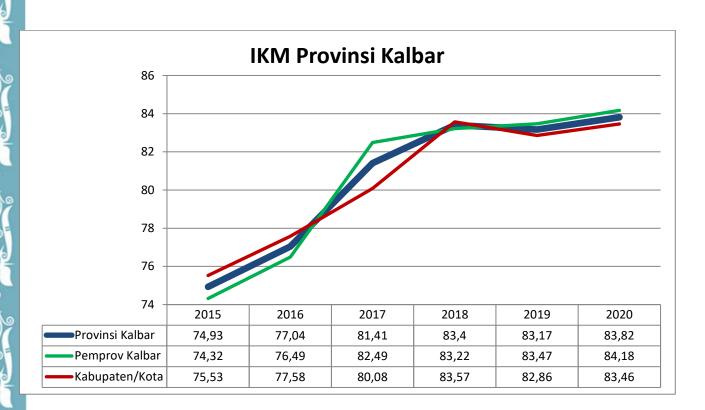
Laporan SKM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 berisi kompilasi laporan hasil SKM pada Unit Penyelengara Pelayanan Publik/UPP (Perangkat Daerah, Biro, dan UPT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan laporan SKM Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar. Untuk Tahun 2020, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah (100 %), 9 (sembilan) Biro (100 %), dan 31 (tiga puluh satu) UPT (57,41 %) di lingkungan Pemprov Kalbar yang melaksanakan SKM. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemprov Kalbar yang merupakan hasil dari pelaksanaan SKM Tahun 2020 adalah 84,18 dengan kategori Baik (B). Nilai ini meningkat 0,71 poin dari tahun sebelumnya (2019) yaitu 83,47. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 (empat belas) UPP meraih IKM dengan kategori A (Sangat Baik), yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (92,93), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (92,80), Dinas Komunikasi dan Informatika (91,13), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (90,82), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (90,13), Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan (89,44), Dinas Sosial (88,88), Dinas Perkebunan (88,86), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (88,58), Biro Administrasi Pembangunan (88,52), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (88,47), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (88,43), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (88,32), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (88,31).

Adapun dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, seluruhnya (100 %) telah menyampaikan Laporan SKM Tahun 2020. IKM rata-rata Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah 83,57 dengan kategori Baik. Untuk IKM Provinsi Kalbar adalah 83,82, yang terdiri dari IKM Pemprov Kalbar (84,18) dan IKM Kabupaten/Kota se-Kalbar (83,46).

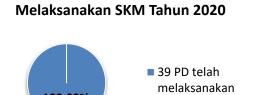
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		Inde	ks Kepua	san Mas	N. 4	+/-			
No.	Pemerintah Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	Mutu Pelaya- nan	dari tahun lalu	Keterangan
Pen	Pemerintah Provinsi Kalbar		82,49	83,22	83,47	84,18	B (Baik)	0,71	Total Jumlah Responden: 4.901 orang Nilai A: 14 UPP UPP yang melaksanakan SKM: 2020: 39 PD (100 %) 9 Biro (100 %) 31 UPT (57,41 %) 2019: Nilai A: 10 UPP 36 PD (97,30 %) 8 Biro (88,89 %) 31 UPT (45,59 %)
Pei	Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar		80,08	83,57	82,86	83,46	B (Baik)	0,60	Kab/Kota yang melaksanakan SKM: 2020:100 % 2019:100 % 2018:92,86 % 2017:85,71 % 2016:78,57 %
1	Kabupaten Bengkayang	75,77	76,95	79,03	81,20	81,98	В	0,78	12 UPP
2	Kabupaten Kapuas Hulu	67,80	NA	81,32	79,44	80,30	В	0,86	15 UPP
3	Kabupaten Kayong Utara	NA	79,27	82,87	82,20	83,40	В	1,20	13 UPP
4	Kabupaten Ketapang	NA	80,95	85,89	80,08	80,14	В	0,06	44 UPP
5	Kabupaten Kubu Raya	76,90	80,37	82,37	83,48	84,14	В	0,66	58 UPP
6	Kabupaten Landak	75,53	72,16	86,55	86,70	87,24	В	0,54	27 UPP
7	Kabupaten Melawi	NA	NA	NA	80,49	78,53	В	-1,96	5 UPP
8	Kabupaten Mempawah	75,72	77,16	80,40	82,45	82,22	В	-0,23	18 UPP
9	Kabupaten Sambas	81,50	82,69	82,79	82,54	83,86	В	1,32	31 UPP
10	Kabupaten Sanggau	82,02	81,91	82,63	83,91	84,96	В	1,05	43 UPP
11	Kabupaten Sekadau	80,10	78,91	81,85	82,50	82,49	В	0,01	39 UPP
12	Kabupaten Sintang	75,92	86,26	90,55	84,52	86,86	В	2,34	1 UPP
13	Kota Pontianak	82,55	82,81	87,55	87,86	88,53	Α	0,67	98 UPP
14	Kota Singkawang	79,67	81,54	82,57	82,63	83,74	В	1,11	47 UPP
(Pe	OVINSI KALBAR mprov Kalbar & nkab/Pemkot se-Kalbar)	77,04	81,41	83,40	83,17	83,82	B (Baik)	0,65	





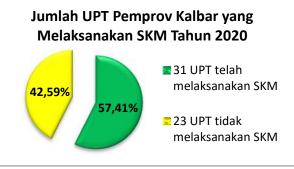


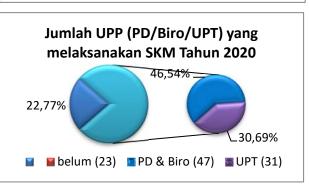


100,00%

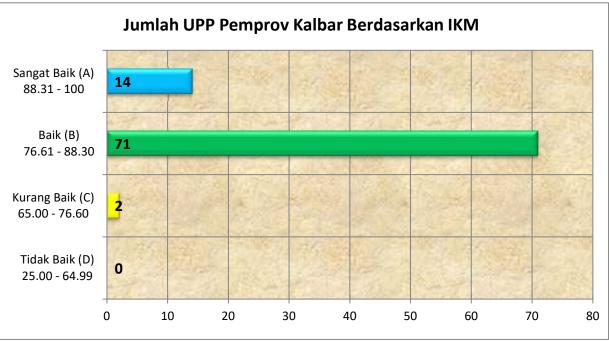
Jumlah Perangkat Daerah yang

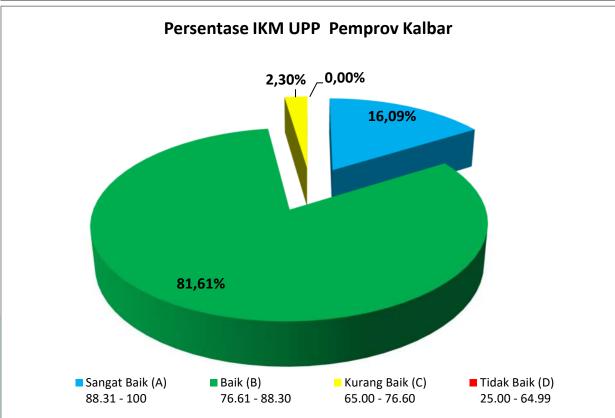


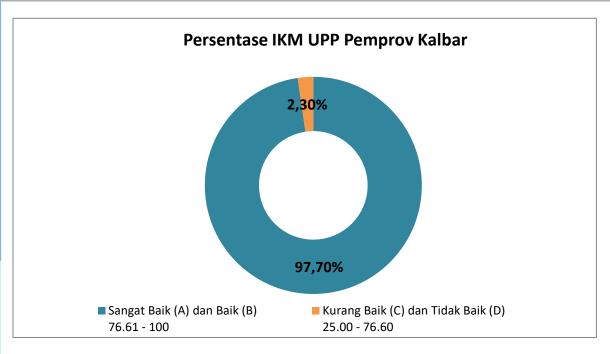




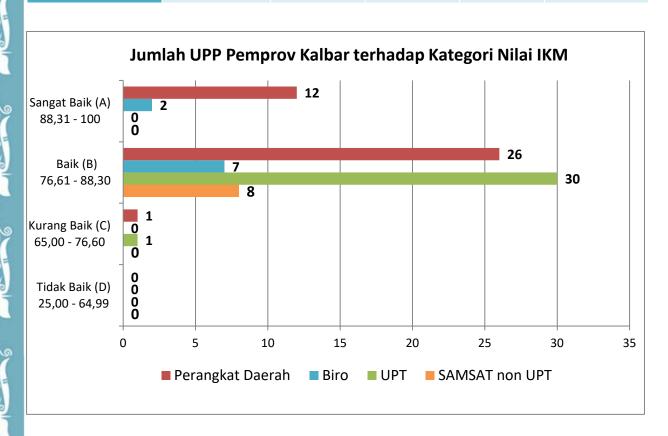
Unit Pen	yelenggara Pelayan	an Publik Pemprov Kalb	ar
UPP	Menyampaikan Laporan SKM	Tidak Menyampaikan Laporan SKM	Jumlah
Perangkat Daerah	39	0	39
Biro	9	0	9
UPT	31	23	54
SAMSAT non UPT	8	0	8
Total	87	23	110





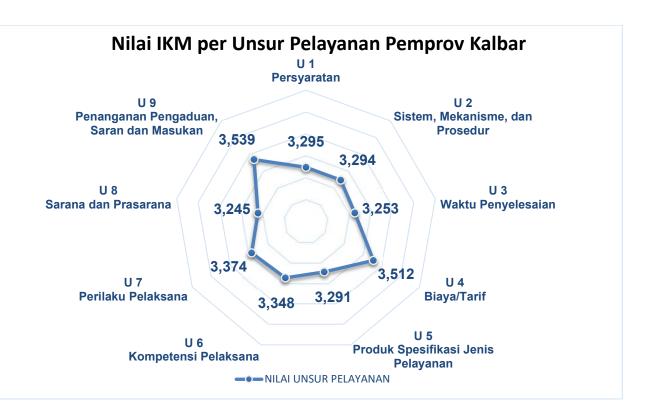


	Rekapitula	ısi IKM UPP I	Pemprov Kal	bar	
Nilai IKM	Perangkat Daerah	Biro	UPT	SAMSAT non UPT	Jumlah
Sangat Baik (A) 88,31 – 100	12	2	0	0	14
Baik (B) 76,61 – 88,30	26	7	30	8	71
Kurang Baik (C) 65,00 - 76,60	1	0	1	0	2
Tidak Baik (D) 25,00 – 64,99	0	0	0	0	0
Total	39	9	31	8	87



Urutan Nilai Per Unsur Pelayanan dari Tertinggi hingga Terendah

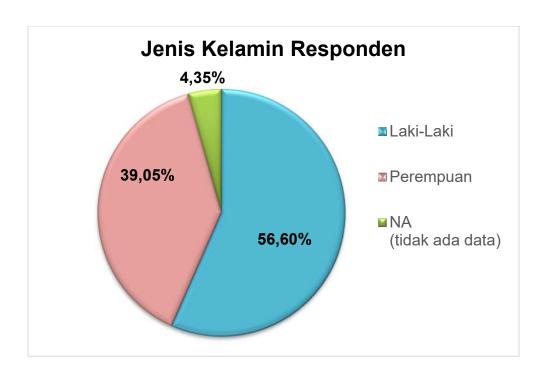
6			<u> </u>		
	No. Urut	No. Unsur	Unsur Pelayanan	Rata – Rata	Kategori
1	1	U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,54	Sangat Baik (A)
	2	U4	Biaya/Tarif	3,51	Baik (B)
9	3	U7	Perilaku Pelaksana	3,37	Baik (B)
	4	U6	Kompetensi Pelaksana	3,35	Baik (B)
	5	U1	Persyaratan	3,30	Baik (B)
	6	U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,29	Baik (B)
	7	U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,29	Baik (B)
1	8	U3	Waktu Penyelesaian	3,25	Baik (B)
-	9	U8	Sarana dan Prasarana	3,24	Baik (B)



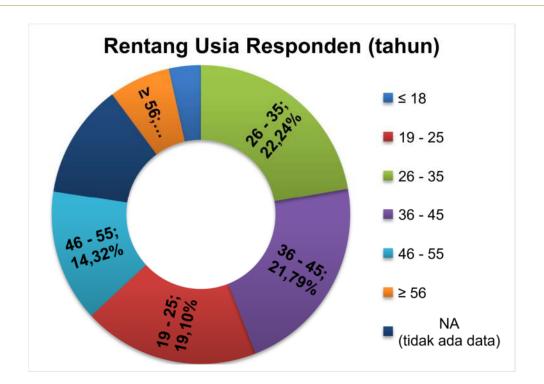
Profil Data Responden

Jumlah Responden: 4.091 orang Rata-Rata Responden: 47 orang per UPP

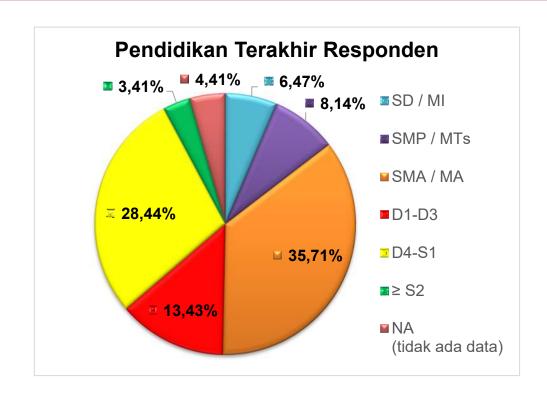
	Jenis Kelamin Responden											
Laki - Laki Perempuan				•	da data atau si kuesioner)	Jumlah (orang)						
Jumlah (orang)	Persentase	Jumlah (orang)	Persentase	Jumlah (orang)	Persentase							
2.774	56,60 %	1.914	39,05 %	213	4,35 %	4.091						



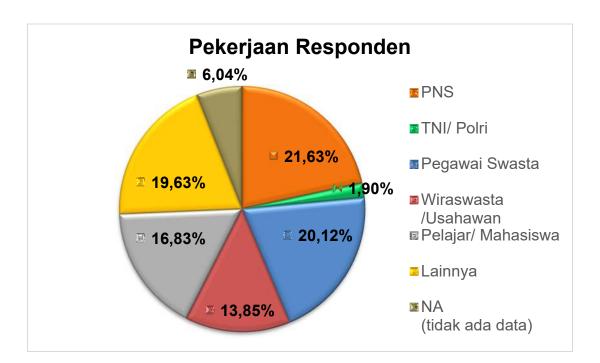
	Rentang Usia Responden (tahun)												
	≤ 18 19 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 ≥ 56 NA*												
Jumlah	170	936	1.090	1.068	702	327	608						
%	3,47 %	19,10 %	22,24 %	21,79 %	6,67 % 12,41 %								
	*) NA : (tidak ada data atau tidak mengisi kuesioner)												



	Pendidikan Responden												
	SD/MI SMP/MTs SMA/K/MA D-1/D-3 D-4/S-1 ≥ S-2 NA*												
Jumlah	317 399		1.750	658	1.394	216							
%	6,47 %	8,14 %	35,71 %	13,34 %	28,44 % 3,41 % 4,41 %								
	*)	NA: (tidak a	ada data atau	tidak meng	isi kuesione	er)							







HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

N	UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	NILAI	KINERJA			UNSUR	PENILAIAN	Pelaksana	Rencana Tindak	Jumlah
0	(PERANGKAT DAERAH / BIRO / UPT)	IKM	UNIT PELAYANAN	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi		Nama Unsur	Survei (Mandiri)		Responden
1	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	86,07	В	_	_	Terendah:	-	 		
	Sekietanat Daeran i Tovinsi Kalimantan Darat	80,07	Baik	_	_	Tertinggi :	-	Y		
	1. Biro Pemerintahan	87,69	В	3,24	4.00	Terendah:	Sarana prasarana	 √	BL	25
	1. Bilo i cincintanan	07,00	Baik	5,24	7,00	Tertinggi :	Biaya/tarif; penanganan pengaduan	•	DL .	20
	2. Biro Hukum	82,58	В			Terendah:		 √		25
	Z. Bilo Hukuiii	02,00	Baik			Tertinggi :		•		20
	3. Biro Kesejahteraan Rakyat	84,67	В	3,00	4,00	Terendah:	Sarana prasarana	→		50
	3. Bilo Resejanteraan Nakyat	04,07	Baik	3,00	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	v		30
	4. Biro Perekonomian	85,36	В	3,00	3,92	Terendah:	Sarana prasarana	\downarrow		25
	4. Billo i crekonomian	00,00	Baik	3,00	3,32	Tertinggi :	Biaya/tarif	•		20
	5. Biro Administrasi Pembangunan	88,52	Α	3,43	4,00	Terendah:	Produk spesifikasi jenis pelayanan	\downarrow		49
	3. Bilo Autilinistrasi i Cilibangarian	00,02	Sangat Baik	3,43	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	•		73
	6. Biro Pengadaan Barang/Jasa	90,13	Α	3,40	3.88	Terendah:	Waktu penyelesaian	\downarrow		50
	o. Bilo i eligadaan balang/Jasa	90,13	Sangat Baik	3,40	3,00	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	v		30
	7. Biro Organisasi	87,14	В	3,28	4,00	Terendah:	System, mekanisme dan prosedur	 √	V	25
	7. Bilo organisasi	01,14	Baik	3,20	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	v	٧	25
	8. Biro Umum	86,47	В	3,00	4,00	Terendah:	Sarana prasarana	\downarrow		25
	S. Bilo official	80,47	Baik	3,00	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	Y		25
	9. Biro Administrasi Pimpinan	82,10	В			Terendah:		\downarrow		25
	9. Bilo Autilitistiasi Filiipiliati	62,10	Baik			Tertinggi :		٧		23
2	Sekretariat DPRD	83,75	В	2,78	3,86	Terendah:	Sarana prasarana			50
	Schictariat Di ND	00,10	Baik	2,10	5,50	Tertinggi :	Biaya/tarif	V		50
3	Inspektorat Provinsi	82,36	В	2,56	3,88	Terendah:	Sarana prasarana			25
٦	inspertoral i rovinsi	02,30	Baik	2,30	3,00	Tertinggi :	Perilaku pelaksana	V		23



4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90,82	А	3,50	3,99	Terendah:	Waktu penyelesaian; produk pelayanan			70
-	Dillas i elididikali dali Nebudayaali	90,62	Sangat Baik	3,50	3,99	Tertinggi :	Biaya/tarif			
	A UDTT D I	70.00	С	0.00	0.05	Terendah:	Sarana prasarana	1		00
	1. UPT Taman Budaya	70,90	Kurang Baik	2,30	3,35	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	- √		20
	O LIDT Museum	05.00	В	2.00	2.50	Terendah:	Biaya/tarif	.1	.1	400
	2. UPT Museum	85,30	Baik	3,26	3,59	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	- √		100
5	Dinas Vasahatan	82,78	В	2.00	3,73	Terendah:	Persyaratan	√		20
5	Dinas Kesehatan	82,78	Baik	3,00	3,73	Tertinggi :	Biaya/tarif			30
	4 LIDT Deleverer Manager to Dawn	00.00	В	2.00	2.50	Terendah:	Biaya/tarif	-1	ء ا	357
	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	80,96	Baik	3,00	3,52	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	_	V	357
_	Dinas Dalvaria an Harrima dan Danataan Dunas	04.40	В	2.00	2.04	Terendah:	Sarana prasarana	-1		F0
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84,42	Baik	3,08	3,94	Tertinggi :	Biaya/tarif	→		50
	4 LIDT I abayetayiya Dahan Kanatyuksi	07.00	В	2.00	3,97	Terendah:	Biaya/tarif	V		24
	UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	87,82	Baik	3,00	3,97	Tertinggi :	Penanganan pengaduan			31
7	Diver Demonstrate Delevatidas Kausasan Demonstrate	04.04	В	0.07	2.50	Terendah:	Waktu penyelesaian	J		F-7
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	81,21	Baik	2,97	3,58	Tertinggi :	Penanganan pengaduan			57
	Divers Ossial	00.00	Α	2.02	4.00	Terendah:	Perilaku pelaksana	V	V	35
8	Dinas Sosial	88,88	Sangat Baik	3,23	4,00	Tertinggi :	Penanganan pengaduan		-V	35
	UPT Panti Sosial dan Rehabilitasi Lanjut Usia	70.70	В	2.00	2.70	Terendah:	Waktu penyelesaian	.1		400
	Mustika Dharma	76,70	Baik	3,22	3,79	Tertinggi :	Biaya/tarif	- √		100
	2. UPT Panti Sosial dan Rehabilitasi Lanjut Usia	00.00	В	2.04	4.00	Terendah:	System, mekanisme dan prosedur	.1	V	
	Mulia Dharma	82,03	Baik	3,04	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	- √	V	50
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	84.60	В	3,14	3,77	Terendah:	Sarana prasarana			141
9	Dillas Teriaga Kerja dari Transmigrasi	64,60	Baik	3,14	3,11	Tertinggi :	Biaya/tarif	٧		141
			_			Terendah:	Persyaratan; produk; sarana	,		
	UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	85,75	B	3,20	4,00	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	- √		30
	Diver Development Development D. C. C. C.	1	Baik			Terendah :	Waktu penyelesaian			
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	92,80	A On which Polity	3,56	3,92	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	- √		25
	Allar	1	Sangat Baik			rorunggi .	i changanan pengadaan			



	İ	1	İ	İ	l Tarandah .	Walsty nanyaloggian		ĺ	İ
Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	89,44	A	3,36	3,76			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	55
		Sangat Baik	·						
UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan	86.30	В	3.06	3 75		• /	$\sqrt{}$		120
Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	00,00	Baik	0,00	0,10	Tertinggi :	<u> </u>	'	,	
Dince Kenendudukan dan Benestatan Cinil	00 50	Α	2 20	2.04	Terendah:	System, mekanisme dan prosedur	ما	ا	05
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipii	88,38	Sangat Baik	3,32	3,84	Tertinggi :	Sarana prasarana	V	V	25
Dings Dambardayaan Masyarakat dan Daga	00.47	А	2.40	2.60	Terendah:	Produk; kompetensi pelaksana	ما		25
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	88,47	Sangat Baik	3,48	3,08	Tertinggi :	Biaya/tarif	V		25
Dings Daybubungan	70.0F	В	2.07	2.67	Terendah:	Sarana prasarana	ما		100
Dinas Pernubungan	79,95	Baik	2,97	3,67	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V		100
Dinas Kansunikasi dan Informatika	01.12	А	2.40	4.00	Terendah:	Sarana prasarana	ما		05
Dinas Komunikasi dan Informatika	91,13	Sangat Baik	3,40	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif; penanganan pengaduan	V		25
Divas Kanayasi Usaka Kasil dan Manandak	00.40	A	2.20	2.00	Terendah:	Persyaratan; sarana prasarana	-1	-1	20
Dinas Koperasi, Usana Kecii dan Menengan	88,43	Sangat Baik	3,30	3,90	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	, v	30
4. UDT D 1.11. 1/	00.00	В	0.00	0.00	Terendah:	prosedur; waktu penyelesaian	1	1	
1. UPT Pelatinan Koperasi	86,86	Baik	3,20	3,93	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	٧	30
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	00.00	В	0.07	0.00	Terendah:	Waktu penyelesaian	1	1	00
Pintu	88,09	Baik	3,27	3,92	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	V	66
Disco Manager da es Olabra da Barinia da	04.00	В	2.46	2.00	Terendah:	Persyaratan	-1		100
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Panwisata	84,08	Baik	3,16	3,96	Tertinggi :	Biaya/tarif	V		100
Division Deviated to a state of the state of	70.00	С	4.40	2.52	Terendah:	Koleksi buku	-1	DI	110
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70,89	Kurang Baik	1,48	3,53	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	BL	110
Dinas Kalautan dan Barikanan	07.00	В	2.45	4.00	Terendah:	Sarana prasarana	ما	ما	06
Dinas Kelautan dan Perikanan	87,20	Baik	3,15	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	V	V	26
1 LIDT Deneronan Mutu Haail Devikanan	04 50	В	0.00	2.00	Terendah:	Biaya/tarif	ما	DI	25
1. OPT Penerapan Mulu Hasii Penkanan	84,58	Baik	2,88	3,92	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	BL	25
2 LIDT Polohuhan Parikanan	96 F.C	В	2.20	2.77	Terendah:	persyaratan	ما		FO
2. UPI Pelabunan Perikanan	80,56	Baik	3,30	3,11	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V		52
O UDT D II D III D III D III D	05.04	В	0.00	0.70	Terendah:	Produk spesifikasi jenis pelayanan	1	,	6-
3. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut	85,91	Baik	3,28	3,76	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	$\sqrt{}$	√	25
	Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1. UPT Pelatihan Koperasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Kelautan dan Perikanan 1. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan 2. UPT Pelabuhan Perikanan	1. UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan 86,30 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 88,58 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 88,47 Dinas Perhubungan 79,95 Dinas Komunikasi dan Informatika 91,13 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 88,43 1. UPT Pelatihan Koperasi 86,86 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 88,09 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 84,08 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 70,89 Dinas Kelautan dan Perikanan 87,20 1. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan 84,58 2. UPT Pelabuhan Perikanan 86,56	1. UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1. UPT Pelatihan Koperasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Kelautan dan Perikanan 1. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan 2. UPT Pelabuhan Perikanan Baik	1. UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan 86,30 Bailk 3,06	1. UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan 86,30	1. UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan 86,30 Baik Baik Terendah : Te	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 1. UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Masyarakat Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 88,58 A Sangat Baik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 88,47 A Sangat Baik Dinas Perhubungan Pojes Baik Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1. UPT Pelatihan Koperasi Dinas Penanganan Terpadu Satu Dinas Penanganan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dinas Kelautan dan Perikanan 87,20 Baik Dinas Kelautan dan Perikanan 88,58 Baik Dinas Kelautan dan Perikanan 88,58 Dinas Kelautan dan Perikanan 88,58 Baik Dinas Kelautan Perikanan 88,58 Baik Dinas Kelautan Perikanan 88,58 Baik Dinas Kelautan Perikanan 88,58 Baik Dinas Kelautan Perikanan 88,58 Baik Dinas Kelautan Perikanan 88,58 Baik Dinas Kelautan Perikanan 88,58 Baik Dinas Kelautan Perikanan 88,58 Baik Dinas Kelautan Perikanan 88,58 Baik Dinas Kelautan Perikanan 88,58 Baik Dinas Kelautan Perikanan 88,58 Baik Dinas Kelautan Perikanan 88,58 Baik Dinas Kelautan Perikanan Baik Dinas Kelautan Perikanan Baik Dinas Kelautan Perikanan Baik Dinas Kelautan Perikanan Baik Dinas Kelautan Perikanan Baik Dinas Kelautan Perikanan Baik Dinas Kelautan Perikanan Baik Dinas Kelautan Perikanan Baik Dinas Kelautan Perikanan Baik Dinas Kelautan Perikanan Baik Dinas Kelautan Perikanan Baik Dinas Kelautan Perikanan Baik Dinas Kelautan Perikanan Baik Dinas Kelautan Perikanan Baik Dinas Kelautan Perikanan Baik Dina	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 89,44 Sangat Baik 3,36 3,76 Terringgi Penanganan pengaduan N N



21	Dinas Portanian Tanaman Dangan dan Hartikultura	82,58	В	3,17	3,84	Terendah:	Kompetensi pelaksana	$\sqrt{}$	V	115
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	82,58	Baik	3,17	3,84	Tertinggi :	Biaya/tarif	V	V	113
			В			Terendah:	Penanganan pengaduan			
	UPT Pembenihan Tanaman Pangan	76.70	Baik	2,12	3,36	Tertinggi :	prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; kompetensi pelaksana	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	25
	O LIDT Dandidikan dan Dalatikan Dartanian	80,92	В	2,96	3,68	Terendah:	Sarana prasarana	$\sqrt{}$		25
	2. UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	80,92	Baik	2,96	3,08	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V		25
	2 LIDT Doloi Donih Induk Howikultura	83,72	В	3,21	3,54	Terendah:	Waktu penyelesaian	V	V	100
	3. UPT Balai Benih Induk Hortikultura	83,72	Baik	3,21	3,54	Tertinggi :	Kompetensi pelaksana	V	V	100
	4. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan	81,42	В	3,04	3,56	Terendah:	Waktu penyelesaian	√	V	100
	Hortikultura	01,42	Baik	3,04	3,36	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	V	100
	E UDT Dengewagen den Certifikasi Denih	76.62	В	2.00	2.00	Terendah:	Sarana prasarana	V	V	111
	5. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih	76,63	Baik	3,00	3,22	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	V	111
22	Dinas Daylahunan	00.06	Α	2.00	4.00	Terendah:	Sarana prasarana	√	V	32
22	Dinas Perkebunan	88,86	Sangat Baik	3,28	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	V	V	32
			В			Terendah:	Waktu penyelesaian			
	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	85,03	Baik	3,56	3,96	Tertinggi :	Persyaratan; kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana	$\sqrt{}$	BL	25
00	Diversities de la History de la Mahadana	00.70	В	2.00	0.75	Terendah:	Sarana prasarana	√		40
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	82,76	Baik	3,00	3,75	Tertinggi :	Biaya/tarif	V		40
	UPT KPH Wilayah Ketapang Utara	84,80	В	3,16	4,00	Terendah:	Produk spesifikasi jenis pelayanan; sarana prasarana	V		25
		, , , , ,	Baik	-, -	,	Tertinggi :	Biaya/tarif			
	O LIDT VDI LWilevich Vicho Beve	00.00	В	0.00	2.02	Terendah:	Perilaku pelaksana	√	DI	40
	2. UPT KPH Wilayah Kubu Raya	82,33	Baik	2,89	3,83	Tertinggi :	Sarana prasarana	V	BL	18
	2 LIDT I/DI LWilevels Melevii	70.07	В	0.70	2.00	Terendah:	prosedur; waktu penyelesaian	√		10
	3. UPT KPH Wilayah Melawi	76,87	Baik	2,70	3,80	Tertinggi :	Biaya/tarif	V		10
	4 LIDT I/DI LWilesels Occupation Times	07.4.4	В	2.07	2.02	Terendah:	Prosedur; sarana prasarana	V	V	20
	4. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	87,14	Baik	3,27	3,93	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	·V	·V	30
	F. LIDT I/DI LWilevels Cinter of Timers	00.04	В	0.00	2.00	Terendah:	Sarana prasarana	ا	ء ا	F0
	5. UPT KPH Wilayah Sintang Timur	80,81	Baik	2,96	3,96	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	50



24	Direct Ferry index Country to Deve Mineral	00.00	А	2.25	4.00	Terendah:	Waktu penyelesaian	.,		20
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	88,32	Sangat Baik	3,35	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	7	V	30
٥٦	Diver Desireductries des Desde des des	00.00	A	2.00	2.00	Terendah:	Sarana prasarana	.1		27
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	92,93	Sangat Baik	3,60	3,92	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	√		37
						Terendah:	Biaya/tarif; produk spesifikasi jenis			
	1. UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan	79,92	В	3,09	3,43	Tankin wwi	pelayanan	√ √		35
			Baik			Tertinggi :	Perilaku pelaksana			
26	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	81,50	В	3,16	3,36	Terendah:	Sarana prasarana	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	25
	3 , ,	,	Baik	,	,	Tertinggi :	persyaratan			
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	84,03	В	3,10	3,99	Terendah:	System, mekanisme dan prosedur			100
	Badan Forendandan Formbanganan Badran (Bappoda)	0 1,00	Baik	0,20		Tertinggi :	Biaya/tarif	,		200
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	84,47	В	3.06	3.58	Terendah:	Waktu penyelesaian	$\sqrt{}$		50
20	Badan Redangan dan Aset Baeran	04,47	Baik	3,00	J,JU	Tertinggi :	persyaratan	V		30
29	Badan Pendapatan Daerah	83,44	В	3,25	3,48	Terendah:	Sarana prasarana	$\sqrt{}$		40
29	Badan Fendapatan Daeran	05,44	Baik	3,23 3,40	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	•	40	
	1. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak	00.4.4	В	0.40	2.44	Terendah :	Produk spesifikasi jenis layanan	,	1	
	Wilayah I	82,14	Baik	3,18	3,44	Tertinggi :	Perilaku pelaksana	- √	$\sqrt{}$	50
			В			Terendah:	Biaya/tarif	,	,	50 25
	1b. SAMSAT Pontianak Wilayah II	80,70	Baik	3,00	3,48	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	√		25
	4 - CAMOAT Kulou Davis	70.04	В	2.00	2.20	Terendah:	Biaya/tarif	.1	1	05
	1c. SAMSAT Kubu Raya	78,81	Baik	3,00	3,32	Tertinggi :	Kompetensi pelaksana	- √	V	25
		04.00	В	0.04	2.52	Terendah:	Biaya/tarif	,	,	0.5
	2. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wil. Singkawang	81,92	Baik	3,04	3,52	Tertinggi :	Perilaku pelaksana	√		25
			В			Terendah:	Sarana prasarana	,	,	
	2b. SAMSAT Bengkayang	79,81	Baik	3,00	3,56	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	√		25
			В			Terendah :	Biaya/tarif	1	,	
	2c. SAMSAT Sambas	80,70	Baik	3,00	3,40	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	- √		25
	2. LIDT Delevenes Dendenster Describ Will Man	70.00	В	0.04	2.22	Terendah:	Biaya/tarif	.1	-1	05
	3. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wil. Mempawah	78,92	Baik	2,84	3,36	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	- √		25
	3b. SAMSAT Ngabang	80,03	В	3,04	3,36	Terendah:	Biaya/tarif	√	$\sqrt{}$	25

			Baik			Tertinggi :	Perilaku pelaksana				
	4 LIDT Delevenen Dendensten Deersk Will Congress	00.40	В	2,96	3,44	Terendah:	Biaya/tarif	V	V	25	
	4. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wil. Sanggau	80,48	Baik	2,96	3,44	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	V	25	
	4b. SAMSAT Sekadau	79,48	В	2,80	3,48	Terendah:	Biaya/tarif	ما	V	25	
	4b. Salvisa i Sekadad	19,40	Baik	2,00	5,46	Tertinggi :	Perilaku pelaksana	V	V	25	
	5. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wil. Sintang	81,03	В	3,04	3,52	Terendah:	Biaya/tarif	ما	√	25	
	5. OF Felayahan Fendapatan Daerah Wii. Sintang	81,03	Baik	3,04	3,52	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	٧		25	
	5b. SAMSAT Melawi	79.81	В	2,96	3,48	Terendah:	Biaya/tarif	ما	V	25	
	DD. SAIVISAT IVIETAWI	19,01	Baik	2,90	3,40	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	٧	V	25	
	6. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kapuas	81,36	В	3,00	3,48	Terendah:	Biaya/tarif	$\sqrt{}$		25	
	Hulu	01,30	Baik	3,00	3,40	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	٧	V	20	
	7. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah	81,70	В	2,88	3,44	Terendah:	Biaya/tarif	2/	V	25	
	Ketapang	81,70	Baik	2,00	5,44	Tertinggi :	Perilaku pelaksana	V	V	25	
	7h CAMCAT Kayang Utara	79,03	В	2,92	3,32	Terendah:	Sarana prasarana	V	V	25	
	7b. SAMSAT Kayong Utara		Baik	2,92	3,32	Tertinggi :	Waktu penyelesaian	V		25	
)	Padan Vanagawaian Pasuah	82,51	В	3,01 3,8	3,80	Terendah:	Sarana prasarana	ما		7-	
,	Badan Kepegawaian Daerah	62,51	Baik	3,01	3,60	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	V	''	
L	Padan Pangambangan Cumbar Daya Manusia	88,31	А	3,35	4,00	Terendah:	Sarana prasarana	V		90	
L	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88,31	Sangat Baik	3,35	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif; kompetensi pelaksana	V		80	
2	Padan Panalitian dan Pangambangan	0/1/5	В	2.47	2.66	Terendah:	Waktu penyelesaian	V	V	EC	
<u> </u>	Badan Penelitian dan Pengembangan	84,45	Baik	3,17	3,66	Tertinggi :	Sarana prasarana	V	V	36	
			_			Terendah:	Kompetensi pelaksana; penanganan	,			
3	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	80,22	B	2,94	3,72	Tertinggi :	pengaduan Biaya/tarif	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	32	
			Baik			Terendah :	Biaya/tarif				
ļ	Badan Penghubung	77,55	B	3,02	3,17	Tertinggi :	Produk spesifikasi jenis pelayanan	\checkmark	BS	10	
			Baik -			Terendah :	System, mekanisme dan prosedur				
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76,66	B	3,34	3,64		,	\checkmark		25 25 25 27 77 80 58 32 100 67	
3			Baik			Tertinggi : Terendah :	Penanganan pengaduan				
ر	Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik	85,32	B	2,20	4,00		Penanganan pengaduan	\checkmark		35	
			Baik			Tertinggi :	Biaya/tarif				



G G									
27	7. Dumah Cakit Ilmum Daarah de Caadaraa	70.04	В	3,04	2.25	Terendah:	Waktu penyelesaian		ا
37	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso	78,04	Baik	3,04	3,35	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	V
20	Donald Calife live Decided	00.40	В	2.00	2.45	Terendah:	Sarana prasarana	-1	-1
38	Rumah Sakit Jiwa Provinsi	80,12	Baik	3,09	3,45	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	Ŋ	.,
			В			Terendah:	Sarana prasarana	,	

3,14

IKM PEMPROV KALBAR TAHUN 2020 84,18

39 Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, hasil SKM dalam bentuk nilai IKM disajikan dalam bentuk mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dengan kategori sebagai berikut:

3,51

Tertinggi:

Penanganan pengaduan

364

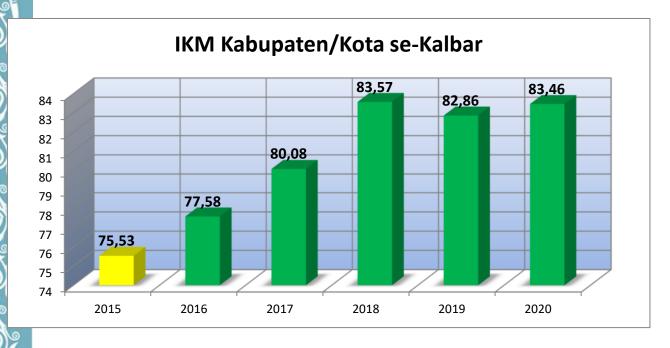
181

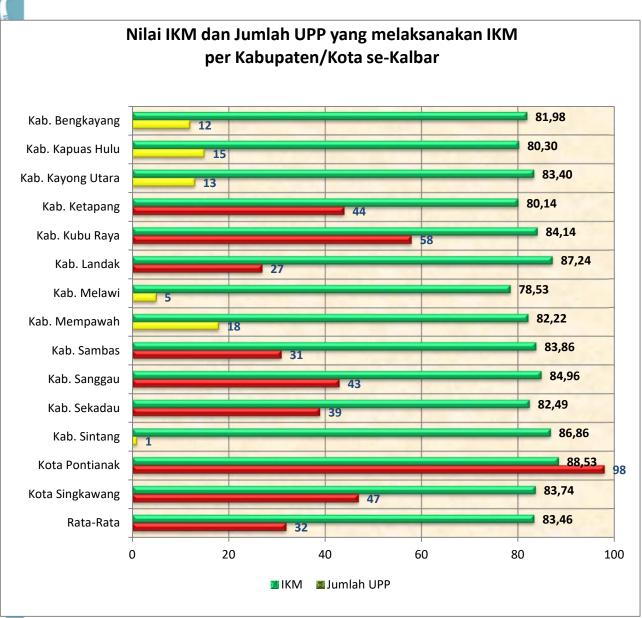
200

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	В	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	Α	Sangat Baik

Baik

80,12









KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan ini merupakan kompilasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah / Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yang memuat informasi hasil survei kepada masyarakat dan pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Laporan ini merupakan gambaran/tolak ukur dari penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan persepsi dan umpan balik dari masyarakat/pengguna layanan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara terus menerus terhadap unsur pelayanan yang dirasa kurang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pelayanan Publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara yang bertugas memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada masyarakat.

Kami berharap laporan dapat dijadikan bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas secara berkelanjutan kepada masyarakat.







\mathcal{DAFTAR} ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan	2
Sasaran	2
Ruang Lingkup	2
Manfaat	3
1.4.Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat	3
1.5. Profil Organisasi	9
1.6. Pengertian Umum	11
1.7. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	12
1.8. Metodologi dan Tahap-Tahap Pelaksanaan SKM	14
1.8.1. Pelaksanaan SKM	14
1.8.2. Perhitungan dan Pengolahan Data SKM	15
BAB II. ANALISIS DAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	18
2.1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	18
Rincian Hasil SKM per Perangkat Daerah/Biro/UPT	24
Rincian Nilai per Unsur Pelayanan	31
Rincian Data Responden	44
2.2. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	49
2.3. Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov & Kabupaten/Kota se-Kalbar)	52
2.4. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Hasil SKM Pemprov Kalbar	54
BAB III. PENUTUP	58
3.1. Kesimpulan	58
3.2 Saran / Rekomendasi	61



BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, hingga saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Masih adanya penyelenggaraan pelayanan publik dengan prosedur yang berbelit-belit, kurang transparan, kurang informatif, kurang konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif membuat perlunya terus dilakukan perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.Oleh karena itu upaya perbaikan dalam memberikan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengetahui sudah sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik telah mampu memenuhi harapan masyarakat, maka diperlukan pengukuran serta upaya untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar disesuaikan dengan perkembangan zaman serta harapan masyarakat, salah satu cara untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik agar semakin baik adalah dengan melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

SKM wajib dilaksanakan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

1.2. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 102 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.
- b. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
- d. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan sehingga Masyarakat dapat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sasaran

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Manfaat

Adapun manfaat dari Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
- 3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
- 4. Diketahui kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Unit Pelayanan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- 5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
- 6. Bagi masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

1.4. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang relatif sangat besar dan salah satu yang terluas di Indonesia dengan luas wilayah mencapai 147.307 km² (14,68 juta Ha) atau sekitar 7,53% dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas Pulau Jawa. Merupakan provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (319.036,05 km²) dan Kalimantan Tengah (153.564,50 km²), sedangkan keempat adalah Kalimantan Timur (129.873 km² setelah dikurangi Provinsi Kalimantan Utara). Wilayah Provinsi Kalbar membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Timur ke Barat. Di bagian Barat berbatasan dengan Selat Karimata dengan lebar 400 km dan kedalaman perairan laut natuna sampai dengan 200 m, sedangkan dibagian timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kalimantan Barat dijuluki pula Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang di antaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.Beberapa sungai besar sampai dengan saat ini masih digunakan sebagai sarana transportasi terutama menuju daerah pedalaman. Sungai besar utama adalah Sungai Kapuas yang

merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.143 km), Sungai Melawi (471 km), Sungai Sambas (233 km), Sungai Sekayam (221 km) dan Sungai Pawan (197 km).

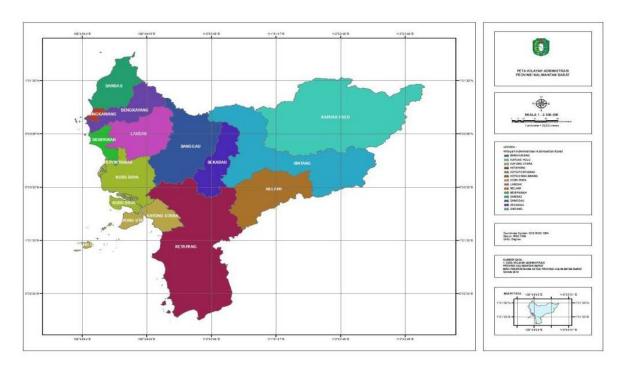
Iklim di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan cuaca hujan tahunan di atas 3.000 milimeter dan hampir merata diseluruh wilayah. Secara umum suhu udara cukup normal dengan variasi rata-rata sekitar 25°C sampai dengan 28°C.

Kalimantan Barat secara astronomis berada pada posisi 2°05' LU serta 3°05' LS serta diantara 108°30' - 114°10' BT, dengan demikian garis khatulistiwa (garis lintang 0°) melintasi provinsi ini dan menjadikan Kota Pontianak sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang di atasnya tepat dilalui oleh garis tersebut. Secara dimensi kewilayahan, Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan antar negara. Untuk wilayah pesisir dan kepulauan terdiri atas Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah pesisir yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan untuk wilayah pedalaman terdiri atas Kabupaten Kapuas.Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kabupaten Sekadau, Sanggau, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Ketapang. Sementara itu, untuk dimensi wilayah perbatasan antara negara merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia disebelah utara yakni terdiri atas Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Wilayah Kalimantan Barat mempunyai karakteristik geografis yang relatif terbuka dan memiliki akses yang lebih luas terhadap wilayah-wilayah potensial selain tiga provinsi lainnya di Kalimantan, yaitu ke wilayah Jawa dan Sumatera, wilayah kepulauan lainnya di Laut Natuna, dan ke luar negeri yaitu Sarawak. Bahkan sebagai salah satu wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang secara resmi memiliki akses jalan darat untuk masuk dan keluar ke/dari negara asing tersebut (Negara Bagian Sarawak, Malaysia) sepanjang 874 km.

Adapun batas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- 1. Bagian Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata
- 2. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur)
- 3. Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa
- 4. Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur



Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. Empat belas kabupaten/kota ini terbagi dalam 174 kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.031 desa.

Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan**)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Sambas	19	-	193
Kab. Mempawah	9	7	60
Kab. Sanggau	15	6	163
Kab. Ketapang	20	9	253
Kab. Sintang	14	16	390
Kab. Kapuas Hulu	23	4	278
Kab. Bengkayang	17	2	122
Kab. Landak	13	-	156
Kab. Sekadau	7	_	87
Kab. Melawi	11	-	169
Kab. Kayong Utara	6	-	43
Kab. Kubu Raya	9	=	117
Kota Pontianak	6	29	-
Kota Singkawang	5	26	-
Kalimantan Barat	174	99	2.031

Sumber: Permendagri Nomor 137 Tahun 2017

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat hingga semester 2 Tahun 2020 berjumlah 5.472.310 jiwa, yang terdiri dari 2.812.218 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.660.092 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan luas wilayah 146.807 Km2, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru 37 jiwa perkilometer persegi

dengan laju pertumbuhan penduduk 1,45%. Dilihat dari sebaran penduduk, pada tahun 2017 Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar yakni sebesar 6.108 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil yakni sebesar 8 jiwa per kilometer persegi.

Tabel Jumlah Penduduk Kalimantan Barat Semester 2 Tahun 2020

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA #	LAKI-LAKI \$	PEREMPUAN #	JUMLAH
6101	Kab. Sambas	327.416	311.869	639.285
6102	Kab. Mempawah	157.478	150.264	307.742
6103	Kab. Sanggau	253.824	235.483	489.307
6104	Kab. Ketapang	297.951	276.905	574.856
6105	Kab. Sintang	214.844	200.690	415.534
6106	Kab. Kapuas Hulu	130.882	124.416	255.298
6107	Kab. Bengkayang	150.403	139.184	289.587
6108	Kab. Landak	211.179	191.574	402.753
6109	Kab. Sekadau	111.586	103.730	215.316
6110	Kab. Melawi	120.816	113.725	234.541
6111	Kab. Kayong Utara	65.795	62.112	127.907
6112	Kab. Kubu Raya	312.027	298.076	610.103
6171	Kota Pontianak	336.195	335.403	671.598
6172	Kota Singkawang	121.822	116.661	238.483
KALIMAI	NTAN BARAT	2.812.218	2.660.092	5.472.310

KEPADATAN PENDUDUK PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN DATA PENDUDUK SEMESTER 1 2020

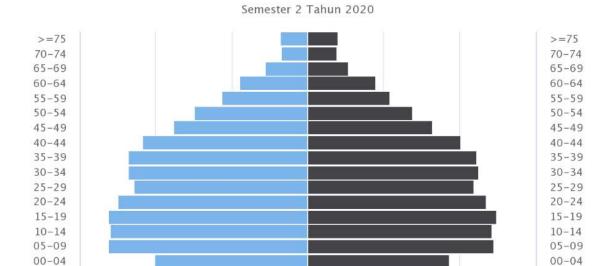
NO	KABUPATEN/KOTA	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	KEPADATAN (Jiwa/km²)
1	Kab. Sambas	6.716,52	639.285	95
2	Kab. Mempawah	1.797,88	307.742	171
3	Kab. Sanggau	12.857,80	489.307	38
4	Kab. Ketapang	31.240,74	574.856	18
5	Kab. Sintang	21.638,20	415.534	19
6	Kab. Kapuas Hulu	29.842,00	255.298	9
7	Kab. Bengkayang	5.075,48	289.587	57
8	Kab. Landak	8.915,10	402.753	45
9	Kab. Sekadau	5.444,20	215.316	40
10	Kab. Melawi	10.640,80	234.541	22
11	Kab. Kayong Utara	4.568,26	127.907	28
12	Kab. Kubu Raya	6.958,22	610.103	88
13	Kota Pontianak	107,80	671.598	6.230
14	Kota Singkawang	504,00	238.483	473
	JUMLAH	146.307,00	5.472.310	37

^{*} Sumber Luas Wilayah : Permendagri No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan



KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
00-04 Tahun	201.054	186.803	387.857
05-09 Tahun	262.455	245.782	508.237
10-14 Tahun	259.628	243.200	502.828
15-19 Tahun	262.149	249,421	511.570
20-24 Tahun	249.751	235.883	485.634
25-29 Tahun	229.108	218.470	447.578
30-34 Tahun	236.869	225.119	461.988
35-39 Tahun	237.107	222.319	459.426
40-44 Tahun	217.826	201.383	419.209
45-49 Tahun	177.327	164.078	341.405
50-54 Tahun	149.010	138.100	287.110
55-59 Tahun	112.989	108.248	221.237
60-64 Tahun	90.002	89.454	179.456
65-69 Tahun	56.484	53.863	110.347
70-74 Tahun	34.417	38.080	72.497
>=75 Tahun	36.042	39,889	75.931
	2.812.218	2.660.092	5,472,31

Grafik Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Barat



100000

Perempuan

200000

300000

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Semester 2 Tahun 2020

100000

Laki-Laki

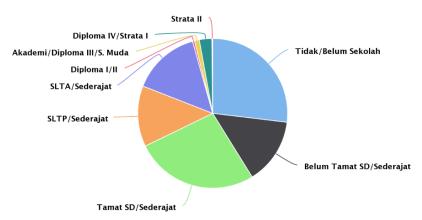
300000

200000

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Tidak/Belum Sekolah	740.568	731.612	1.472.180
Belum Tamat SD/Sederajat	401.521	379.771	781.292
Tamat SD/Sederajat	732.997	724.361	1.457.358
SLTP/Sederajat	374.767	343.872	718.639
SLTA/Sederajat	445.230	359.943	805.173
Diploma I/II	11.252	12.323	23.575
Akademi/Diploma III/S. Muda	24.506	32.749	57.255
Diploma IV/Strata I	75.233	72.216	147.449
Strata II	5.827	3.083	8.910
Strata III	317	162	479
	2.812.218	2.660.092	5.472.310

Grafik Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

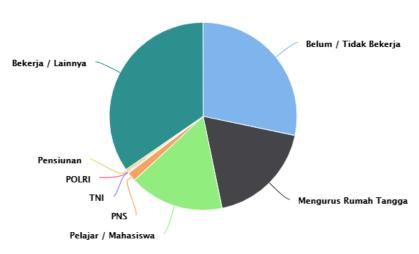
Semester 2 Tahun 2020



PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Belum / Tidak Bekerja	816.481	731.553	1.548.034
Mengurus Rumah Tangga	573	1.010.101	1.010.674
Pelajar / Mahasiswa	481.216	413.584	894.800
PNS	47.221	37.689	84.910
TNI	10.147	169	10.316
POLRI	9.818	537	10.355
Pensiunan	15.805	4.747	20.552
Bekerja / Lainnya	1.430.957	461.712	1.892.669

Grafik Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Semester 2 Tahun 2020



1.5. Profil Organisasi

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) mengkoordinir:
 - Biro Pemerintahan
 - Biro Hukum
 - Biro Kesejahteraan Rakyat
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) mengkoordinir:
 - Biro Perekonomian
 - Biro Administrasi Pembangunan
 - Biro Pengadaan Barang/Jasa
 - c. Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III) mengkoordinir:
 - Biro Organisasi
 - Biro Umum
 - Biro Administrasi Pimpinan
- 2. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
- 3. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
- 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 5. Dinas Kesehatan
- 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 8. Dinas Sosial
- 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 11. Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 14. Dinas Perhubungan
- 15. Dinas Komunikasi dan Informatika
- 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 20. Dinas Kelautan dan Perikanan
- 21. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 22. Dinas Perkebunan
- 23. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 26. Satuan Polisi Pamong Praja
- 27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 28. Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 29. Badan Pendapatan Daerah
- 30. Badan Kepegawaian Daerah
- 31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 32. Badan Penelitian dan Pengembangan
- 33. Badan Pengelola Perbatasan Daerah
- 34. Badan Penghubung
- 35. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 37. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso
- 38. Rumah Sakit Jiwa Provinsi
- 39. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong

1.6. Pengertian Umum

Untuk mengetahui kinerja pelayanan publik, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan, yaitu setiap bulan, setiap 3 (tiga) bulan, setiap 4 (empat) bulan, setiap semester, atau paling kurang 1 (satu) kali setahun. Hal yang menjadi perhatian utama atas hasil survey tersebut, adalah harus ada saran perbaikan dari pemberi layanan yang disurvey terhadap peningkatan kualitas layanan serta rencana tindak lanjut perbaikan. Penyelenggara pelayanan

publik mempublikasikan hasil SKM terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan publik dan metodologi survey yang digunakan. Penyampaian hasil Survey Kepuasan Masyarakat dapat disampaikan melalui papan pengumuman/papan informasi dan/atau media massa dan/atau laman internet dan/atau media sosial atau media informasi lainnya.

Beberapa pengertian istilah seputar Survey Kepuasan Masyarakat (SKM):

- Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
- 2. Unit Pelayanan Publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
- 3. Unsur Survey Kepuasan Masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- 4. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik.
- 5. Instansi Pemerintah adalah Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
- 6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 7. Evaluasi Pelayanan Publik adalah proses pengukuran dan penilaian secara komprehensif penyelenggaraan pelayanan publik.
- 8. Observasi lapangan adalah pengamatan langsung dilapangan.
- 9. Kuesioner yaitu alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis atau daftar pertanyaan, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos.
- 10. Wawancara adalah tanya jawab antara evaluator dan sumber informasi penyelenggara pelayanan yang sedang di evaluasi.

1.7. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Berdasarkan Peraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

1.8. Metodologi dan Tahap-Tahap Pelaksanaan SKM

1.8.1. Pelaksanaan SKM

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Persiapan, terdiri dari:
 - 1. Penyusunan daftar pertanyaan instrumen survey;
 - 2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
 - 3. Menentukan responden;
 - 4. Penggandaan daftar pertanyaan survey;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, terdiri dari :
 - 1. Daftar pertanyaan survey yang dibagikan kepada responden; dan
 - 2. Setelah diisi oleh responden, daftar pertanyaan dan jawaban dikumpulkan.

Lokasi pengumpulan data dapat dilakukan di:

- a. Lokasi masing-masing unit pelayanan;
- b. Lingkungan perumahan atau tempat berkumpulnya Masyarakat;
- c. Lokasi lain yang ditentukan oleh pelaksana survey.

Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei antara lain:

- a. Kuesioner dengan tatap muka;
- Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat:
- c. Kuesioner elektronik (internet/e-survey);
- d. Diskusi kelompok terfokus;
- e. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.
- c. Pengolahan data, terdiri dari:
 - 1. Data yang terdapat pada jawaban atas setiap pertanyaan dimasukkan dalam format tabulasi; dan
 - 2. Hasil tabulasi dihitung sesuai rumus yang telah ditentukan.
- d. Analisis data, yaitu melakukan analisa data sehingga dapat dijadikan rekomendasi untuk peningkatan kulitas pelayanan publik.
- e. Menyajikan dan melaporkan hasil dalam bentuk laporan SKM tahunan.

1.8.2. Perhitungan dan Pengolahan Data SKM

1. Penyusunan Kuesioner

Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan yang disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Adapun bentuk kuesioner dibagi atas 4 (empat) bagian yaitu :

- a. Identitas masyarakat/responden, meliputi nomor urut, usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisa profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan publik;
- b. Identitas pencacah/petugas survey yang meliputi nama dan Nomor Induk
 Pegawai (NIP) dan/atau data lain;
- c. Pendapat responden tentang pelayanan publik yang meliputi pertanyaan dan pilihan jawaban dari penerima pelayanan/responden terhadap unsurunsur pelayanan yang dinilai;
- d. Saran perbaikan yaitu kolom yang dapat diisi uraian penjelasan secara umum oleh responden terhadap pelayanan yang diterima yang dapat berupa saran, kritik, maupun apresiasi.

2. Nilai Persepsi Jawaban Kuesioner

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

Contoh: Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

- a. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.
- b. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- c. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- d. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

3. Penentuan Jumlah Responden

- a. Menggunakan table sampel Morgan dan Krejcie, terutama untuk pelayanan yang bersifat langsung.
- b. Unit pelayanan publik yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat tetapi populasi penerima layanannya kurang dari 100 orang maupun unit pelayanan publik yang memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada masyarakat, jumlah responden terpilih ditetapkan sejumlah minimal 25 orang.
- c. Unit pelayanan publik yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat maupun unit pelayanan publik yang memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada masyarakat tetapi populasi penerima layanannya kurang dari 25 orang maka jumlah responden ditetapkan sama atau disesuaikan dengan jumlah populasi penerima layanan.

4. Pengisian Kuesioner

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan dua cara sebagai berikut:

- a. Dilakukan sendiri oleh penerima layanan dan hasilnyadikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.
- b. Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara oleh:
 - Unit pelayanan sendiri, walaupun sebenarnya dengan cara ini hasilnya kemungkinan besar akan subyektif, karena dikhawatirkan jawaban yang kurang baik mengenai instansinya akan mempengaruhi obyektivitas penilaian.
 - Untuk mengurangi subyektifitas hasil penyusunan indeks, dapat melibatkan unsur pengawasan atau sejenisnya yang terkait.
 - 2) Unit independen yang sudah berpengalaman, baik untuk tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Independensi ini perlu ditekankan untuk menghindari jawaban yang subyektif. Unit independen dapat terdiri dari unsur instansi terkait misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) atau Perguruan Tinggi (pakar) atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Pelaku Usaha, pihak ketiga lainnya atau kombinasi di antara unit tersebut.

5. Perhitungan Nilai Rata – Rata Tertimbang (NRR)

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks SKM terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus yaitu bobot nilai rata-rata tertimbang = jumlah bobot dibagi jumlah unsur yaitu 1/9 = 0,111.

Nilai Rata – Rata (NRR) tertimbang =
$$\frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}}$$
 = $\frac{1}{9}$ = 0,111

6. Perhitungan Nilai Hasil SKM

Untuk memperoleh nilai hasil SKM berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus yaitu total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang atau IKM = total nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai rata-rata tertimbang.

$$IKM = \frac{Total dari nilai persepsi per unsur}{total unsur yang terisi} x nilai rata-rata tertimbang$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian hasil SKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian pada ayat dikonversikan dengan nilai dasar 25, yaitu nilai IKM dikali 25.

7. Kategori Nilai Hasil SKM dalam Bentuk Mutu Pelayanan

Hasil SKM dalam bentuk nilai IKM disajikan dalam bentuk mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dengan kategori sebagai berikut :

Nilai	Nilai Interval	Nilai Interval	Mutu	Kinerja
Persepsi	SKM	Konversi SKM	Pelayanan	Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	В	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik



$\mathcal{BAB}II$



ANALISIS & HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Perangkat Daerah baik yang melakukan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar diolah dan dianalisa lebih lanjut sehingga diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2.1 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pada tahun 2020, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah (100 %), 9 (sembilan) Biro (100 %), dan 31 (tiga puluh satu) UPT (57,41 %) di lingkungan Pemprov Kalbar yang melaksanakan SKM. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemprov Kalbar Tahun 2020 adalah 84,18 dengan kategori Baik (B). Nilai ini meningkat 0,71 poin dari tahun sebelumnya (2019) yaitu 83,47.



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemprov Kalbar dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2015, nilai IKM Pemprov Kalbar berada pada posisi 74,32 dan meningkat 2,17 poin menjadi 76,49 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebsesar 6 poin dari tahun 2016, sehingga nilai IKM Pemprov Kalbar pada tahun 2017 adalah 82,49. Pada tahun 2018, nilai IKM Pemprov Kalbar adalah 83,22 dan terjadi peningkatan sebesar 0,73 poin dari tahun 2017.

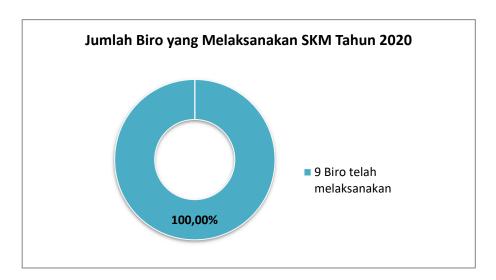
Sedangkan nilai IKM Pemprov Kalbar pada tahun 2019 adalah 83,47 dan terjadi peningkatan 0,25 poin dari tahun 2018. Adapun pada tahun 2020, IKM Pemprov Kalbar berada pada nilai 84,18, meningkat 0,71 poin dari tahun 2019.

Nilai IKM Pemprov Kalbar dalam 6 (enam) tahun terakhir ini merupakan suatu hal yang positif karena senantiasa mengalami peningkatan nilai IKM setiap tahunnya. Hal ini patut disyukuri karena masyarakat maupun *stakeholder* terkait penyelenggaraan pelayanan publik memberikan apresiasi terhadap upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar setiap tahunnya. Namun demikian, sejak tahun 2017 tidak terjadi lonjakan peningkatan nilai IKM Pemprov Kalbar yang melebihi 1 poin. Peningkatan nilai IKM dari tahun 2017 ke 2018 dan dari tahun 2018 ke 2019 serta dari tahun 2019 ke tahun 2020 tidak mencapai 1 poin dan hanya berada pada kisaran nol koma sekian poin. Hal ini salah satunya dikarenakan faktor nilai IKM Pemprov Kalbar telah dinilai berada pada kategori Baik oleh masyarakat, sehingga perlu upaya untuk mempertahankan nilai dan kategori ini. Selain itu terjadi peningkatan baik dari jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan pelaksanaan SKM maupun dari jumlah responden. Adapun untuk meningkatkan nilai IKM menjadi kategori Sangat Baik yang berada pada kisaran angka 88,31 – 100, Pemprov Kalbar akan melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan, kolaboratif, dan terintegrasi.

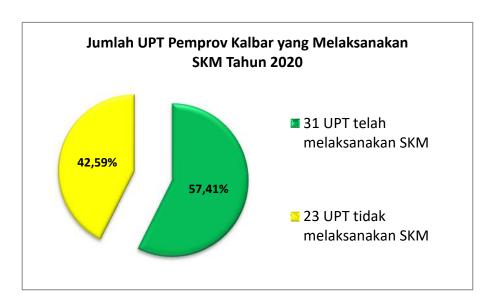
Pada Tahun 2020, dari 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar, seluruh Perangkat Daerah atau 100 % telah melaksanakan dan melaporkan hasil SKM Tahun 2020.



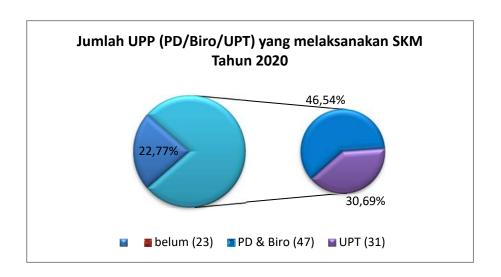
Dari 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar salah satunya adalah Sekretariat Daerah. Dari 9 (Sembilan) Biro yang ada di Lingkungan Setda Provinsi Kalbar, seluruh Biro atau 100 % telah melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan SKM Tahun 2020.



Selain itu, dari 54 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Lingkungan Pemprov Kalbar, diluar dari UPT Satuan Pendidikan, sebanyak 31 (tiga puluh satu) UPT atau 51,41 % menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SKM Tahun 2020.



Dengan demikian, komposisi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) Pemprov Kalbar adalah sebanyak 102 (seratus dua) UPP yang terdiri dari Perangkat Daerah, Biro, dan UPT. Untuk UPP yang tidak melaporkan hasil pelaksanaan SKM Tahun 2020 sebanyak 23 (dua puluh tiga) UPT atau sebesar 22,77 %. Adapun UPP yang menyampaikan laporan SKM Tahun 2020 sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) UPP atau sebesar 77,23 %. Dari 79 (tujuh puluh sembilan) UPP tersebut, sebanyak 48 (empat puluh delapan) atau 46,54 % berasal dari Perangkat Daerah beserta Biro, dan 31 (tiga puluh satu) atau 30,69 % berasal dari UPT.



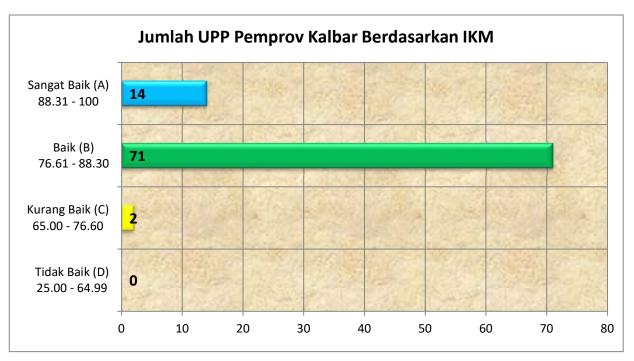
Persentase jumlah Perangkat Daerah, Biro, dan UPT yang menyampaikan laporan SKM Tahun 2020 sangat baik karena untuk Perangkat Daerah dan Biro telah seluruhnya telah menyampaikan dengan persentase 100 %.

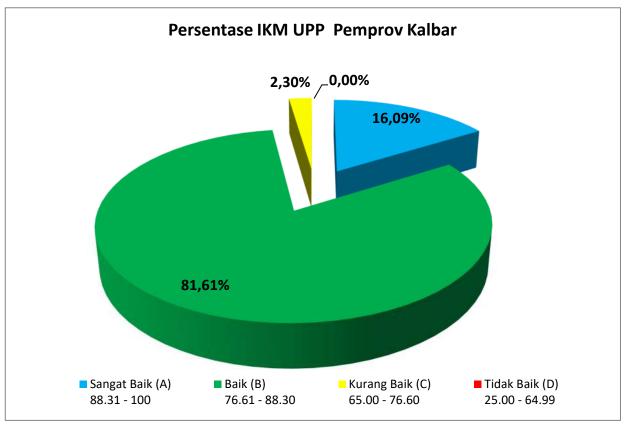
Unit Pen	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemprov Kalbar											
UPP	Menyampaikan Laporan SKM	Tidak Menyampaikan Laporan SKM	Jumlah									
Perangkat Daerah	39	0	39									
Biro	9	0	9									
UPT	31	23	54									
SAMSAT non UPT	8	0	8									
Total	87	23	110									

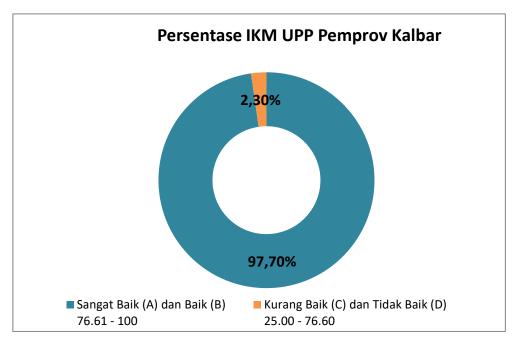
Dari 79 (tujuh puluh sembilan) UPP Pemprov Kalbar ditambah 8 (delapan) SAMSAT non UPT yang menyampaikan laporan SKM Tahun 2020, sebanyak 14 (empat belas) UPP meraih IKM dengan kategori A (Sangat Baik) dengan persentase 16,09 %, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (92,93), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (92,80), Dinas Komunikasi dan Informatika (91,13), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (90,82), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (90,13), Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan (89,44), Dinas Sosial (88,88), Dinas Perkebunan (88,86), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (88,58), Biro Administrasi Pembangunan (88,52), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (88,47), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (88,43), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (88,32), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (88,31).

Selain itu mayoritas UPP Pemprov Kalbar yaitu sebanyak 71 (tujuh puluh satu) atau 81,61 % yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) Perangkat Daerah/Biro/UPT ditambah 8 (delapan) SAMSAT non UPT mendapatkan IKM pada kategori Baik (B) dengan rentang nilai

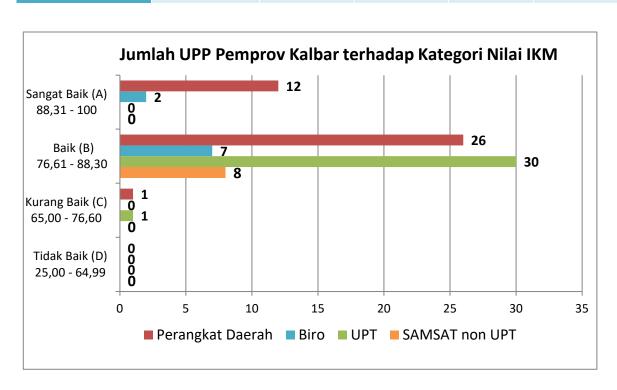
76,61 – 88,30. Namun masih terdapat 2 (dua) UPP atau 2,3 % yang mendapatkan kategori Kurang Baik (C) dan tidak ada UPP atau 0 % yang mendapatkan kategori Tidak Baik (D). Dengan demikian untuk UPP yang mendapatkan kategori nilai A (sangat Baik) dan B (Baik) adalah sejumlah 85 (delapan puluh lima) UPP dengan persentase 97,70 %. Adapun UPP yang mendapatkan kategori nilai C (Kurang Baik) dan D (Tidak Baik) adalah sejumlah 2 (dua) UPP dengan persentase 2,30 %.







Rekapitulasi IKM UPP Pemprov Kalbar												
Nilai IKM	Perangkat Daerah	Biro	UPT	SAMSAT non UPT	Jumlah							
Sangat Baik (A) 88,31 – 100	12	2	0	0	14							
Baik (B) 76,61 – 88,30	26	7	30	8	71							
Kurang Baik (C) 65,00 - 76,60	1	0	1	0	2							
Tidak Baik (D) 25,00 – 64,99	0	0	0	0	0							
Total	39	9	31	8	87							



Adapun rincinal hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah/Biro/UPT di lingkungan Pemprov Kalbar adalah sebagai berikut:

N	LINIT DENIVELENCOADA DELAVANAN DUDUK	NIII A!	KINERJA			UNSUR	PENILAIAN	Pelaksana	Rencana	
N O	UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK (PERANGKAT DAERAH / BIRO / UPT)	NILAI IKM	UNIT PELAYANAN	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi		Nama Unsur	Survei (Mandiri)	Tindak Lanjut (RTL)	Jumlah Responden
1	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	86,07	В			Terendah:	-			
	Sekretariat Daerari Provinsi Kallinantan Barat	80,07	Baik	-	-	Tertinggi :	-	V		
	1. Biro Pemerintahan	87,69	В	3,24	4.00	Terendah:	Sarana prasarana	V	BL	25
	1. Bilo remembanan	81,09	Baik	5,24	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif; penanganan pengaduan	٧	DL	25
	2. Biro Hukum	82,58	В			Terendah:		<u></u>		25
	2. DIIO HUKUIII	62,56	Baik			Tertinggi :		V		25
	3. Biro Kesejahteraan Rakyat	84,67	В	3,00	4.00	Terendah:	Sarana prasarana	- √		50
	3. Bilo Resejanteraan Rakyat	04,07	Baik	3,00	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	\ \ \		50
	4 Dira Parakanamian	85,36	В	2.00	3,92	Terendah:	Sarana prasarana	. V		25
	4. Biro Perekonomian	85,36	Baik	3,00	3,92	Tertinggi :	Biaya/tarif] V		25
	E Disa Administraci Descharaturas	00.50	А	2.42	4.00	Terendah:	Produk spesifikasi jenis pelayanan	√		40
	5. Biro Administrasi Pembangunan	88,52	Sangat Baik	3,43	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif] V		49
	C. Divo Dongodon Doveng / Inc.	00.42	А	2.40	2.00	Terendah:	Waktu penyelesaian	. V		F0
	6. Biro Pengadaan Barang/Jasa	90,13	Sangat Baik	3,40	3,88	Tertinggi :	Penanganan pengaduan			50
	7 Diva Ouranianai	0744	В	2.00	4.00	Terendah:	System, mekanisme dan prosedur	-1	V	0.5
	7. Biro Organisasi	87,14	Baik	3,28	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	√ √	V	25
	C. Directions	00.47	В	2.00	4.00	Terendah:	Sarana prasarana	-1		٥٢
	8. Biro Umum	86,47	Baik	3,00	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	√ √		25
	O Dies Adesir interesi Dieseriese	00.40	В			Terendah:		.1		05
	9. Biro Administrasi Pimpinan	82,10	Baik			Tertinggi :		√ √		25
	Columba viet DDDD	00.75	В	0.70	2.00	Terendah:	Sarana prasarana			F0
2	Sekretariat DPRD	83,75	Baik	2,78	3,86	Tertinggi :	Biaya/tarif	√ √		50

	Landa Maria A Brandoni	00.00	В	0.50	2.00	Terendah:	Sarana prasarana		[05
3	Inspektorat Provinsi	82,36	Baik	2,56	3,88	Tertinggi :	Perilaku pelaksana	1 V		25
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90,82	А	3,50	3.99	Terendah :	Waktu penyelesaian; produk pelayanan	√		70
'		00,02	Sangat Baik	3,55	0,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	<u> </u>		
	4 LIDT Taylor Dudaya	70.00	С	0.00	2.25	Terendah:	Sarana prasarana	V		00
	1. UPT Taman Budaya	70,90	Kurang Baik	2,30	3,35	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	- V		20
	O LIDT Market	05.00	В	2.00	2.50	Terendah:	Biaya/tarif	√	V	400
	2. UPT Museum	85,30	Baik	3,26	3,59	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	1 V	V	100
_	Divos Kasahatan	00.70	В	2.00	2.72	Terendah:	Persyaratan	√		20
5	Dinas Kesehatan	82,78	Baik	3,00	3,73	Tertinggi :	Biaya/tarif	- V		30
	4 LIDT Deleverson Manahatan Dami	00.00	В	2.00	2.50	Terendah:	Biaya/tarif	V	V	257
	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	80,96	Baik	3,00	3,52	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	- V	N N	357
6	Dinas Pakariaan Umum dan Panataan Buang	04.40	В	2.00	3,94	Terendah:	Sarana prasarana	√		50
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84,42	Baik	3,08	3,94	Tertinggi :	Biaya/tarif	\ \ \		50
	UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	87,82	В	3,00	3,97	Terendah:	Biaya/tarif	V		31
	1. OPI Laboratorium Barian Konstruksi	01,02	Baik	3,00	3,91	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V		31
7	Dinas Parumahan Palurat dan Kawasan Parmukinan	01 01	В	2.07	2.50	Terendah:	Waktu penyelesaian			57
'	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	81,21	Baik	2,97	3,58	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V		57
	Dinos Cosial	00.00	А	2.02	4.00	Terendah:	Perilaku pelaksana	√	V	25
8	Dinas Sosial	88,88	Sangat Baik	3,23	4,00	Tertinggi :	Penanganan pengaduan		N N	35
	UPT Panti Sosial dan Rehabilitasi Lanjut Usia	76,70	В	3,22	2.70	Terendah:	Waktu penyelesaian	V		100
	Mustika Dharma	76,70	Baik	3,22	3,79	Tertinggi :	Biaya/tarif	V		100
	2. UPT Panti Sosial dan Rehabilitasi Lanjut Usia	82,03	В	3,04	4,00	Terendah:	System, mekanisme dan prosedur	√	V	50
	Mulia Dharma	82,03	Baik	3,04	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	V	50
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	84,60	В	3,14	3,77	Terendah:	Sarana prasarana	- V		141
	Dinas Tenaga Nerja dan Hansinigrasi	34,00	Baik	3,14	3,11	Tertinggi :	Biaya/tarif	, v		141

	1. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	85,75	В	3,20	4,00	Terendah:	Persyaratan; produk; sarana prasarana	$\sqrt{}$		30
			Baik			Tertinggi :	Penanganan pengaduan			
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	92,80	Α	3,56	3,92	Terendah:	Waktu penyelesaian			25
	Anak	02,00	Sangat Baik	0,00	0,02	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	,		
11	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	89,44	Α	3,36	3,76	Terendah:	Waktu penyelesaian		V	55
	Billia Fallgari, Fatoriakari aari Koosilatari Tollari	00,	Sangat Baik	0,00	3,. 3	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	,		
	1. UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan	86,30	В	3,06	3,75	Terendah :	Biaya/tarif		V	120
	Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	00,00	Baik	0,00	5,15	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	,	<u>'</u>	120
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88,58	Α	3,32	3,84	Terendah:	System, mekanisme dan prosedur	$\sqrt{}$	V	25
12	Dinas Rependudukan dan Fencatatan Sipii	88,38	Sangat Baik	3,32	3,04	Tertinggi :	Sarana prasarana	٧	V	25
13	Dinga Damhardayaan Magyarakat dan Daga	88,47	Α	3,48	3,68	Terendah:	Produk; kompetensi pelaksana	$\sqrt{}$		25
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	00,47	Sangat Baik	3,40	3,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	V		25
4.4		70.05	В	0.07	0.07	Terendah:	Sarana prasarana	1		400
14	Dinas Perhubungan	79,95	Baik	2,97	3,67	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V		100
4.5	Dinas Kananaliasi dan Informatika	04.40	Α	2.40	4.00	Terendah:	Sarana prasarana	√		0.5
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	91,13	Sangat Baik	3,40	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif; penanganan pengaduan	l V		25
10	5: V : II I V II I W	00.40	A	0.00	0.00	Terendah:	Persyaratan; sarana prasarana	1	1	00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	88,43	Sangat Baik	3,30	3,90	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	$\sqrt{}$		30
		00.00	В	0.00	0.00	Terendah:	prosedur; waktu penyelesaian	,	1	
	UPT Pelatihan Koperasi	86,86	Baik	3,20	3,93	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	√	V	30
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu		В			Terendah:	Waktu penyelesaian	1	1	
17	Pintu	88,09	Baik	3,27	3,92	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	V	66
			В			Terendah:	Persyaratan	1		
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	84,08	Baik	3,16	3,96	Tertinggi :	Biaya/tarif	√		100
			С			Terendah:	Koleksi buku	,		
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70,89	Kurang Baik	1,48	3,53	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	√	BL	110
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	87,20	B	3,15	4,00	Terendah :	Sarana prasarana	√	√	26

			Baik			Tertinggi :	Biaya/tarif			
	4 LIDT Department Marky Head Deviloped	04.50	В	0.00	2.00	Terendah:	Biaya/tarif	√	DI	0.5
	1. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	84,58	Baik	2,88	3,92	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	BL	25
	O LIDT Delekukan Derikanan	00.50	В	2.20	0.77	Terendah:	persyaratan	.1		
	2. UPT Pelabuhan Perikanan	86,56	Baik	3,30	3,77	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	$\sqrt{}$		52
	2 LIDT Davilson on Budidous Air Douge, don Lout	05.04	В	2.00	2.70	Terendah:	Produk spesifikasi jenis pelayanan	√	-1	0.5
	3. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut	85,91	Baik	3,28	3,76	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	√	25
04	Disco Destanias Tanaman Desgan des Hestilustus	00.50	В	2.47	2.04	Terendah:	Kompetensi pelaksana	٠١	V	445
21	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	82,58	Baik	3,17	3,84	Tertinggi :	Biaya/tarif	$\sqrt{}$	N N	115
			В			Terendah:	Penanganan pengaduan			
	1. UPT Pembenihan Tanaman Pangan	76.70	Baik	2,12	3,36	Tertinggi :	prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; kompetensi pelaksana	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	25
	O LIDT Dandidikan dan Dalatikan Dantanian	00.00	В	0.00	2.00	Terendah:	Sarana prasarana	ما		0.5
	2. UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	80,92	Baik	2,96	3,68	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	$\sqrt{}$		25
	2 LIDT Dalai Damila landud. Hantiluultuura	83.72	В	2.04	2.54	Terendah:	Waktu penyelesaian	√	V	100
	3. UPT Balai Benih Induk Hortikultura	83,72	Baik	3,21	3,54	Tertinggi :	Kompetensi pelaksana	V	V	100
	4. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan	04.40	В	2.04	2.50	Terendah:	Waktu penyelesaian	$\sqrt{}$	V	100
	Hortikultura	81,42	Baik	3,04	3,56	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	V	100
	E LIDT De grande de la Contiflicat De gib	70.00	В	2.00	2.00	Terendah:	Sarana prasarana	.1	-1	444
	5. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih	76,63	Baik	3,00	3,22	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	$\sqrt{}$	√	111
00	Din a Dadahan a	00.00	Α	2.00	4.00	Terendah:	Sarana prasarana	.1	V	20
22	Dinas Perkebunan	88,86	Sangat Baik	3,28	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	$\sqrt{}$	N N	32
	1 LIDT Pangayagan dan Cartifikasi Panih		В			Terendah:	Waktu penyelesaian			
	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	85,03	Baik	3,56	3,96	Tertinggi :	Persyaratan; kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana	\checkmark	BL	25
22	Dinas Lingkungan Hidun dan Kabutanan	90.76	В	2.00	2.75	Terendah:	Sarana prasarana	√		40
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	82,76	Baik	3,00	3,75	Tertinggi :	Biaya/tarif	V		40

	1. UPT KPH Wilayah Ketapang Utara	84,80	В	3,16	4,00	Terendah:	Produk spesifikasi jenis pelayanan; sarana prasarana	√		25
			Baik			Tertinggi :	Biaya/tarif			
	2. UPT KPH Wilayah Kubu Raya	82,33	В	2,89	3,83	Terendah:	Perilaku pelaksana	√	BL	18
	, ,		Baik	·		Tertinggi :	Sarana prasarana			
	3. UPT KPH Wilayah Melawi	76,87	В	2,70	3,80	Terendah:	prosedur; waktu penyelesaian			10
	,	,	Baik	,	,	Tertinggi :	Biaya/tarif			
	4. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	87,14	В	3,27	3,93	Terendah:	Prosedur; sarana prasarana		$\sqrt{}$	30
	4. Of FRITT Wildyan Ganggaa Timur	01,14	Baik	0,21	3,33	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	•	*	30
	5. UPT KPH Wilayah Sintang Timur	80,81	В	2,96	3.96	Terendah:	Sarana prasarana		\checkmark	50
	5. OF REH Wildyan Sintang Tilliui	80,81	Baik	2,90	3,90	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	\ \ \	V	50
24	Din as Fu audi dan Quarkan Dana Minanal	00.00	А	2.25	4.00	Terendah:	Waktu penyelesaian	V	V	20
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	88,32	Sangat Baik	3,35	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	V	V	30
0.5	Dinas Parindustrian dan Pandagangan	00.00	A	2.00	2.00	Terendah:	Sarana prasarana	.1		27
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	92,93	Sangat Baik	3,60	3,92	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	√ √		37
						Terendah:	Biaya/tarif; produk spesifikasi jenis			
	1. UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan	79,92	В	3,09	3,43		pelayanan			35
			Baik			Tertinggi :	Perilaku pelaksana			
26	 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	81,50	В	3,16	3,36	Terendah :	Sarana prasarana		$\sqrt{}$	25
	outdan't onor t among t raja (outport t)	02,00	Baik	0,20	0,00	Tertinggi :	persyaratan	,	,	
27	 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	84,03	В	3,10	3,99	Terendah:	System, mekanisme dan prosedur			100
21	Badair i erencanaari i embangunan Baeran (Bappeda)	04,03	Baik	3,10	3,99	Tertinggi :	Biaya/tarif	٧		100
28	Radan Kayangan dan Asat Daarah	04.47	В	3,06	3,58	Terendah:	Waktu penyelesaian			50
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	84,47	Baik	3,06	3,58	Tertinggi :	persyaratan	\ \ \		50
	De des Desidenctes Design	00.44	В	2.05	2.40	Terendah:	Sarana prasarana	V	-1	40
00		83,44		3,25	3,48	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	- V	$\sqrt{}$	40
29	Badan Pendapatan Daerah	00,	Baik			rerunggi.	renanganan pengaduan			
29	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak	82,14	Baik B	3,18	3,44	Terendah :	Produk spesifikasi jenis layanan	√ √	√	50

dh. CAMCAT Dantingal, Wileyah II	00.70	В	2.00	2.40	Terendah:	Biaya/tarif		$\sqrt{}$	25	
1b. SAMSAT Pontianak Wilayah II	80,70	Baik	3,00	3,48	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	V	25	
4 - CAMCAT Kubu Paua	70.04	В	2.00	2.20	Terendah:	Biaya/tarif	√	-1	٥٦	
1c. SAMSAT Kubu Raya	78,81	Baik	3,00	3,32	Tertinggi :	Kompetensi pelaksana	V		25	
2. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wil.	04.00	В	2.04	2.50	Terendah:	Biaya/tarif	√	√	25	
Singkawang	81,92	Baik	3,04	3,52	Tertinggi :	Perilaku pelaksana	V	V	25	
Oh CAMCAT Dangkayang	79,81	В	3,00	3,56	Terendah:	Sarana prasarana		√	25	
2b. SAMSAT Bengkayang	79,81	Baik	3,00	3,56	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	V	25	
2a CAMCAT Cambaa	80,70	В	2.00	3,40	Terendah:	Biaya/tarif	√	√	25	
2c. SAMSAT Sambas	80,70	Baik	3,00	3,40	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	V	25	
2. LIDT Delevenen Dendensten Deersh Wil Memourch	70.00	В	0.04	2.26	Terendah:	Biaya/tarif	√	√	25	
3. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wil. Mempawah	78,92	Baik	2,84	3,36	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	V	25	
2h CAMCAT Nigahang	00.00	В	2.04	3,36	Terendah:	Biaya/tarif	√	√	٥٢	
3b. SAMSAT Ngabang	80,03	Baik	3,04	3,36	Tertinggi :	Perilaku pelaksana	٧	V	25	
LIDT Delevenen Dendensten Deersh Wil Constant	80,48	В	2,96	3,44	Terendah:	Biaya/tarif	√	V	25	
4. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wil. Sanggau	80,48	Baik	2,96	3,44	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	V	25	
Ale CANCAT Calcaday	70.40	В	0.00	2.40	Terendah:	Biaya/tarif	√	V	0.5	
4b. SAMSAT Sekadau	79,48	Baik	2,80	3,48	Tertinggi :	Perilaku pelaksana	٧	V	25	
E UDT Delevere Developeter Developeter	04.00	В	2.04	2.50	Terendah:	Biaya/tarif	√	V	0.5	
5. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wil. Sintang	81,03	Baik	3,04	3,52	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	7	N N	25	
Eb CAMCAT Malauri	70.01	В	2,96	2.40	Terendah:	Biaya/tarif	√	V	25	
5b. SAMSAT Melawi	79,81	Baik	2,96	3,48	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	V	25	
6. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah	04.00	В	2.00	2.40	3,48	Terendah:	Biaya/tarif	√	√	0.5
Kapuas Hulu	81,36	Baik	3,00	3,48	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	V	25	
7. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah		В			Terendah:	Biaya/tarif	,			
Ketapang	81,70 Baik	2,88	3,44	Tertinggi :	Perilaku pelaksana	√ √	√	25		
7b. SAMSAT Kayong Utara	79,03	В	2,92	3,32	Terendah:	Sarana prasarana	√	√	25	

			Baik			Tertinggi :	Waktu penyelesaian			
20	Daday Kanagayajay Daayah	00.54	В	2.04	2.00	Terendah:	Sarana prasarana	-1	-1	77
30	Badan Kepegawaian Daerah	82,51	Baik	3,01	3,80	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	√	77
24	Dadan Dangarahangan Cumban Dang Manusia	00.24	А	2.25	4.00	Terendah:	Sarana prasarana	√		00
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88,31	Sangat Baik	3,35	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif; kompetensi pelaksana	V		80
32	Dadan Danalitian dan Dangambangan	04.45	В	2.47	2.66	Terendah:	Waktu penyelesaian	√	V	58
32	Badan Penelitian dan Pengembangan	84,45	Baik	3,17	3,66	Tertinggi :	Sarana prasarana	V	V	36
						Terendah:	Kompetensi pelaksana; penanganan	,	,	
33	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	80,22	В	2,94	3,72	T 12 4 2	pengaduan	$\sqrt{}$		32
			Baik			Tertinggi :	Biaya/tarif			
34	Badan Penghubung	77,55	В	3,02	3,17	Terendah:	Biaya/tarif	$\sqrt{}$	BS	100
34		11,55	Baik	3,02	2 3,11	Tertinggi :	Produk spesifikasi jenis pelayanan	V	ВЗ	100
35	Dadan Dananggulangan Danasana Daarah	76.66	В	2.24	2.64	Terendah :	System, mekanisme dan prosedur	√		67
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76,66	Baik	3,34	3,64	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V		07
20	Daday Kasatusa Dayasa dan Dakili	05.00	В	0.00	4.00	Terendah:	Penanganan pengaduan	٠١		25
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik	85,32	Baik	2,20	4,00	Tertinggi :	Biaya/tarif	V		35
27	Diversity Caldit Heaving Desirate du Candana	70.04	В	2.04	2.25	Terendah:	Waktu penyelesaian	-1	V	204
37	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso	78,04	Baik	3,04	3,35	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	V	-V	364
00	B 10177 B 1	00.40	В	0.00	0.45	Terendah:	Sarana prasarana	1	1	404
38	Rumah Sakit Jiwa Provinsi	80,12	Baik	3,09	3,45	Tertinggi :	Penanganan pengaduan	$\sqrt{}$	V	181
00		00.40	В	0.14	0.54	Terendah:	Sarana prasarana	1		000
39	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong	80,12	Baik	3,14	,14 3,51	3,51 Tertinggi : Penanganan pengaduan	Penanganan pengaduan	V		200

IKM PEMPROV KALBAR TAHUN 2020 84,18

						NILAI I	UNSUR PELA	YANAN			
NO).	PERANGKAT DAERAH / BIRO / UPT	U 1 Persyaratan	U 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	U 3 Waktu Penyelesaian	U 4 Biaya/ Tarif	U 5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	U 6 Kompetensi Pelaksana	U 7 Perilaku Pelaksana	U 8 Sarana dan Prasarana	U 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	1.	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat									
2		1. Biro Pemerintahan	3,32	3,40	3,28	4,00	3,32	3,52	3,52	3,24	4,00
3		2. Biro Hukum	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
4		3. Biro Kesejahteraan Rakyat	3,16	3,12	3,03	4,00	3,20	3,20	3,08	3,00	3,92
5		4. Biro Perekonomian	3,44	3,24	3,28	3,92	3,48	3,36	3,56	3,00	3,48
6		5. Biro Administrasi Pembangunan	3,45	3,45	3,43	4,00	3,43	3,55	3,57	3,47	3,53
7		6. Biro Pengadaan Barang/Jasa	3,58	3,50	3,40	3,60	3,52	3,62	3,54	3,84	3,88
8		7. Biro Organisasi	3,32	3,28	3,32	4,00	3,48	3,48	3,36	3,32	3,84
9		8. Biro Umum	3,48	3,52	3,32	4,00	3,40	3,36	3,44	3,00	3,64
10		9. Biro Administrasi Pimpinan	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
11	2.	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat	3,28	3,32	3,34	3,86	3,36	3,36	3,20	2,78	3,72
12	3.	Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	3,52	3,68	2,92	3,72	2,96	3,60	3,88	2,56	2,84
13	4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,64	3,64	3,50	3,99	3,50	3,51	3,57	3,59	3,79
14		UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan									
15		2. UPT Taman Budaya	2,45	3,10	2,65	3,00	2,85	2,85	3,00	2,30	3,35
16		3. UPT Museum	3,49	3,42	3,28	3,26	3,36	3,39	3,58	3,70	3,59
17		4. UPT Satuan Pendidikan SMA/SMK sebanyak 370									
18		5. UPT Satuan Pendidikan Khusus sebanyak 13									
19	5.	Dinas Kesehatan	3,00	3,06	3,60	3,73	3,30	3,16	3,36	3,03	3,56
20		UPT Laboratorium Kesehatan									
21		2. UPT Pelayanan Kesehatan Paru	3,29	3,22	3,30	3,00	3,17	3,21	3,25	3,22	3,52

		3. UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga									
22		Masyarakat									
23		4. UPT Pelatihan Kesehatan									
24		5. UPT Akper Sintang									
25	6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,26	3,40	3,20	3,94	3,36	3,26	3,16	3,08	3,76
26		UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	3,61	3,58	3,67	3,00	3,39	3,39	3,45	3,58	3,97
27	7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3,18	3,14	2,97	3,54	3,19	3,25	3,30	3,12	3,58
28	8.	Dinas Sosial	3,51	3,49	3,40	3,91	3,63	3,34	3,23	3,51	4,00
29		UPT Panti Sosial dan Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma	3,30	3,60	3,22	3,79	3,36	3,39	3,28	3,29	3,28
30		UPT Panti Sosial dan Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma	3,14	3,04	3,12	4,00	3,06	3,34	3,32	3,24	3,30
31		3. UPT Panti Sosial Anak									
32	9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,42	3,39	3,56	3,77	3,50	3,24	3,18	3,14	3,29
33		UPT Latihan Kerja Industri									
34		UPT Latihan Kerja Industri Entikong									
35		UPT Laboratorium Kesehatan Kerja									
36		4. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	3,20	3,33	3,27	3,93	3,20	3,27	3,50	3,20	4,00
37		5. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II									
38	10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,64	3,64	3,56	3,76	3,64	3,68	3,88	3,72	3,92
39	11.	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	3,71	3,56	3,36	3,53	3,51	3,62	3,62	3,53	3,76
40		UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	3,44	3,47	3,33	3,06	3,53	3,55	3,48	3,50	3,75
41		UPT Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak									
42	12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,40	3,32	3,28	3,72	3,48	3,52	3,56	3,84	3,80
43	13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,52	3,52	3,64	3,68	3,48	3,48	3,52	3,52	3,52

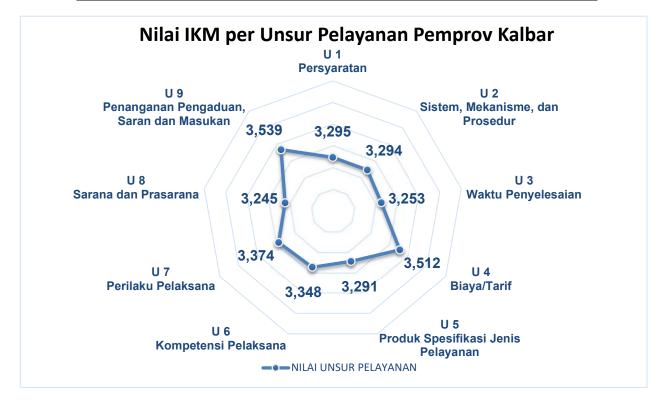
45 15. Dinas Komunikasi dan Informatika 3,60 3,68 3,48 4,00 3,48 3,52 3,68 3,40 46 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3,30 3,47 3,53 3,83 3,33 3,57 3,63 3,30 47 1. UPT Pelatihan Koperasi 3,30 3,20 3,20 3,87 3,27 3,60 3,63 3,30 48 17. Terpadu Satu Pintu 3,29 3,36 3,27 3,86 3,33 3,50 3,67 3,53 49 18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3,16 3,21 3,20 3,96 3,22 3,17 3,30 3,20 50 19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2,84 3,40<	3,90 3,93 3,92 3,88 3,53 3,81 3,92 3,77 3,76
47 1. UPT Pelatihan Koperasi 3,30 3,20 3,20 3,87 3,27 3,60 3,63 3,30 48 17. Terpadu Satu Pintu 3,36 3,21 3,20 3,96 3,22 3,17 3,30 3,20 49 18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3,16 3,21 3,20 3,96 3,22 3,17 3,30 3,20 50 19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2,84 3,31 3,50 3,15 3,15 3,25 3,40 3,52 3,40 3,52 3,40 3,52	3,93 3,92 3,88 3,53 3,81 3,92 3,77
48 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 3,29 3,36 3,27 3,86 3,33 3,50 3,67 3,53 49 18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3,16 3,21 3,20 3,96 3,22 3,17 3,30 3,20 50 19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2,84 3,31 3,50 3,15 3,15 3,15 3,15 3,25 3,40 3,22 3,40 3,32 3,40 3,22 3,40 3,51 3,51 3,43 3,44 <td>3,92 3,88 3,53 3,81 3,92 3,77</td>	3,92 3,88 3,53 3,81 3,92 3,77
48 17. Terpadu Satu Pintu 49 18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3,16 3,21 3,20 3,96 3,22 3,17 3,30 3,20 50 19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2,84 3,31 3,50 3,15 3,15 3,15 3,25 3,40 3,52 3,40 3,52 3,40 3,51 3,43 3,43 <td>3,88 3,53 3,81 3,92 3,77</td>	3,88 3,53 3,81 3,92 3,77
49 18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3,16 3,21 3,20 3,96 3,22 3,17 3,30 3,20 50 19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2,84 3,31 3,50 3,15 3,15 3,15 3,51 3,50 3,15 3,40 3,52 3,40 3,52 3,40 3,52 3,40 3,51 3,51 3,43 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44	3,53 3,81 3,92 3,77
50 19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2,84 <	3,53 3,81 3,92 3,77
51 20. Dinas Kelautan dan Perikanan 3,42 3,42 3,39 4,00 3,42 3,31 3,50 3,15 52 1. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan 3,44 3,28 3,32 2,88 3,32 3,40 3,52 3,40 53 2. UPT Pelabuhan Perikanan 3,30 3,32 3,36 3,53 3,47 3,51 3,51 3,43 3. UPT Perikanan Budidaya Air Payau 3,48 3,40 3,32 3,40 3,28 3,44 3,44 3,44	3,81 3,92 3,77
52 1. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan 3,44 3,28 3,32 2,88 3,32 3,40 3,52 3,40 53 2. UPT Pelabuhan Perikanan 3,30 3,32 3,36 3,53 3,47 3,51 3,51 3,43 3. UPT Perikanan Budidaya Air Payau 3,48 3,40 3,32 3,40 3,28 3,44 3,44 3,44	3,92 3,77
53 2. UPT Pelabuhan Perikanan 3,30 3,32 3,36 3,53 3,47 3,51 3,51 3,43 3. UPT Perikanan Budidaya Air Payau 3,48 3,40 3,32 3,40 3,28 3,44 3,44 3,44	3,77
3. UPT Perikanan Budidaya Air Payau 3,48 3,40 3,32 3,40 3,28 3,44 3,44 3,44	·
	3,76
54 dan Laut	
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 3,18 3,20 3,23 3,83 3,34 3,17 3,31 3,24	3,20
55 21. Hortikultura	0.40
56 1. UPT Pembenihan Tanaman Pangan 3,00 3,36 3,36 3,00 3,36 3,16 2,92	2,12
2. UPT Pendidikan dan Pelatihan 3,12 3,20 3,16 3,56 3,00 3,16 3,32 2,96 57 Pertanian Pertanian 3,12 3,20 3,16 3,56 3,00 3,16 3,32 2,96	3,68
	3,46
58 3. UPT Balai Benih Induk Hortikultura 3,24 3,30 3,21 3,34 3,27 3,54 3,53 3,28 4. UPT Perlindungan Tanaman Pangan 3,25 3,11 3,04 3,39 3,16 3,24 3,39 3,20	3,56
59 dan Hortikultura 5,25 5,11 5,04 5,39 5,16 5,24 5,39 5,20	3,50
60 5. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih 3,06 3,02 3,02 3,02 3,07 3,02 3,19 3,00	3,22
61 22. Dinas Perkebunan 3,50 3,59 3,47 4,00 3,47 3,53 3,53 3,28	3,94
1. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih 3,96 3,64 3,56 3,76 3,92 3,96 3,96 3,84	3,84
62 Perkebunan	0,01
63 23. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3,15 3,30 3,10 3,75 3,20 3,30 3,35 3,00	3,68
64 1. UPT KPH Wilayah Mempawah	
65 2. UPT KPH Wilayah Landak	
66 3. UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Selatan	
67 4. UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur	
68 5. UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara	
69 6. UPT KPH Wilayah Kayong	

70		7. UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan									
71		8. UPT KPH Wilayah Ketapang Utara	3,20	3,28	3,20	4,00	3,16	3,52	3,28	3,16	3,76
72		9. UPT KPH Wilayah Kubu Raya	3,17	3,44	3,22	3,39	3,22	3,44	2,89	3,83	3,06
73		10. UPT KPH Wilayah Melawi	2,80	2,70	2,70	3,80	2,90	3,10	3,10	2,90	3,70
74		11. UPT KPH Wilayah Sambas									
75		12. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat									
76		13. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	3,37	3,27	3,33	3,90	3,40	3,43	3,50	3,27	3,93
77		14. UPT KPH Wilayah Sekadau									
78		15. UPT KPH Wilayah Bengkayang									
79		16. UPT KPH Wilayah Sintang Utara									
80		17. UPT KPH Wilayah Sintang Timur	3,08	3,12	3,04	3,98	3,20	3,18	3,30	2,96	3,96
81	24.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3,41	3,48	3,35	4,00	3,41	3,45	3,52	3,48	3,72
82	25.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3,78	3,62	3,70	3,65	3,68	3,76	3,78	3,60	3,92
		1. UPT Industri Pangan Olahan dan	3,11	3,11	3,20	3,09	3,09	3,37	3,43	3,26	3,11
83		Kemasan									
0.4		2. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu									
84	2.0	Barang	2.26	2.20	3,20	3,28	3,26	3,30	3,32	2.16	3,24
85	26.	Satuan Polisi Pamong Praja	3,36	3,30	•		•	•	· ·	3,16	•
86	27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,24	3,10	3,11	3,99	3,34	3,38	3,41	3,12	3,59
87	28.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3,58	3,50	3,06	3,56	3,48	3,24	3,52	3,38	3,26
88	29.	Badan Pendapatan Daerah	3,30	3,28	3,40	3,32	3,33	3,30	3,43	3,25	3,48
89		UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pentianak Wilayah I Pentianak Wil	3,32	3,24	3,26	3,22	3,18	3,38	3,44	3,22	3,34
09		Pontianak Wilayah I 1b. SAMSAT Pontianak Wilayah II	3,36	3,28	3,12	3,00	3,12	3,36	3,24	3,12	3,48
		1c. SAMSAT Kubu Raya	3,24	3,12	3,16	3,00	3,12	3,32	3,16	3,04	3,40
		UPT Pelayanan Pendapatan Daerah	3,24	3,12	3,10	3,04	3,32	3,32	3,52	3,20	3,44
		Wilayah Singkawang	0,24	0,27	0,20	0,04	0,02	0,02	0,02	0,20	0,77
		2b. SAMSAT Bengkayang	3,20	3,24	3,04	3,12	3,08	3,32	3,20	3,00	3,56
		2c. SAMSAT Sambas	3,36	3,32	3,28	3,00	3,12	3,20	3,24	3,16	3,40
		3. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah	3,24	3,12	3,08	2,84	3,20	3,24	3,24	3,12	3,36
		Wilayah Mempawah		·		·	·			·	
1	1	3b. SAMSAT Ngabang	3,24	3,20	3,12	3,04	3,32	3,28	3,36	3,08	3,20

		UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau	3,00	3,08	3,32	2,96	3,32	3,32	3,28	3,28	3,44
		4b. SAMSAT Sekadau	3,12	3,00	3,28	2,80	3,44	3,12	3,24	3,48	3,16
		5. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sintang	3,20	3,08	3,32	3,04	3,36	3,16	3,32	3,20	3,52
		5b. SAMSAT Melawi	3,20	3,28	3,20	2,96	3,16	3,20	3,28	3,00	3,48
		6. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kapuas Hulu	3,28	3,36	3,24	3,00	3,28	3,20	3,28	3,20	3,48
		7. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang	3,36	3,20	3,36	2,88	3,40	3,24	3,44	3,20	3,36
		7b. SAMSAT Kayong Utara	3,20	3,12	3,32	3,24	3,08	3,12	3,24	2,92	3,24
96	30.	Badan Kepegawaian Daerah	3,18	3,20	3,14	3,67	3,23	3,24	3,29	3,01	3,76
97	31.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,38	3,36	3,51	4,00	3,34	4,00	3,38	3,35	3,51
98	32.	Badan Penelitian dan Pengembangan	3,31	3,33	3,17	3,50	3,26	3,29	3,33	3,66	3,59
99	33.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3,16	3,16	3,03	3,72	3,09	2,94	3,22	3,66	2,94
100	34.	Badan Penghubung	3,04	3,07	3,04	3,02	3,17	3,07	3,06	3,06	3,06
101	35.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,42	3,34	3,45	3,33	3,42	3,54	3,49	3,64	3,64
102	36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,34	3,34	3,37	4,00	3,31	3,49	3,37	3,29	2,20
103	37.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso	3,10	3,05	3,04	3,34	3,12	3,17	3,18	3,04	3,35
104	38.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi	3,20	3,16	3,10	3,20	3,12	3,36	3,18	3,09	3,45
105	39.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong	3,23	3,22	3,19	3,22	3,24	3,23	3,18	3,14	3,51
		Σ Nilai / Unsur	283,347	283,320	279,770	302,019	283,027	287,941	290,184	279,089	304,374
		Nilai Rata-Rata per Unsur	3,295	3,294	3,253	3,512	3,291	3,348	3,374	3,245	3,539

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah, Biro, dan UPT di Lingkungan Pemprov Kalbar, maka dapat digambarkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Rata – Rata
U1	Persyaratan	3,30
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,29
U3	Waktu Penyelesaian	3,25
U4	Biaya/Tarif	3,51
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,29
U6	Kompetensi Pelaksana	3,35
U7	Perilaku Pelaksana	3,37
U8	Sarana dan Prasarana	3,24
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,54



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa unsur pelayanan yang mendapatkan nilai persepsi kepuasan paling tinggi dari masyarakat adalah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 3,54 yang berada dalam kategori Sangat Baik (A). Adapun untuk unsur pelayanan terendah yaitu Sarana dan Prasarana dengan nilai 3,24 yang berada dalam kategori Baik (B). Adapun nilai IKM per unsur pelayanan berdasarkan hasil tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut:

No. Urut	No. Unsur	Unsur Pelayanan	Rata – Rata	Kategori
1	U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,54	Sangat Baik (A)
2	U4	Biaya/Tarif	3,51	Baik (B)
3	U7	Perilaku Pelaksana	3,37	Baik (B)
4	U6	Kompetensi Pelaksana	3,35	Baik (B)
5	U1	Persyaratan	3,30	Baik (B)
6	U2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	3,29	Baik (B)
7	U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,29	Baik (B)
8	U3	Waktu Penyelesaian	3,25	Baik (B)
9	U8	Sarana dan Prasarana	3,24	Baik (B)

Dari urutan hasil nilai IKM per unsur layanan tersebut terlihat bahwa seluruh unsur pelayanan telah berada pada kategori Baik (B) bahkan terdapat unsur pelayanan yang mendapatkan kategori Sangat BAik (A). Dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,54 dan berada pada kategori Sangat Baik (A). Masyarakat dan responden menganggap bahwa penanganan pengaduan dan pengelolaan pengaduan yang mancakup juga informasi dan konsultasi secara umum telah tersedia dan berjalan dengan Sangat Baik di lingkungan Pemprov Kalbar. Hal ini juga dapat dilihat dari penghargaan yang diperoleh Pemprov Kalbar selama tahun 2020 terkait hal tersebut yaitu Pemprov yang Informatif (zona hijau) dalam hal Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat, Top Pengelolaan Pengaduan LAPOR-SP4N dari Kementerian PAN dan RB, dan Provinsi Terbaik Pertama dalam hal Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dari Kementerian PAN dan RB.

Selanjutnya unsur pelayanan yang berada pada urutan kedua tertinggi yaitu Biaya/Tarif dengan nilai 3,51 yang berada pada kategori Baik (B). Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa masyarakat dan responden menilai bahwa biaya yang ditampilkan sesuai dengan biaya yang dimintakan / dibayarkan, dengan kata lain tidak ada praktek pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Pemprov Kalbar. Selain itu masyarakat / responden juga menilai bahwa biaya yang dikenakan masih dalam taraf wajar / sesuai dan bahkan banyak pelayanan yang diberikan tanpa memungut biaya alias gratis / tanpa biaya.

Unsur pelayanan yang berada pada urutan ketiga tertinggi yaitu Perilaku Pelaksana dengan nilai 3,37 yang berada pada kategori Baik (B). Dari hasil ini dapat dilihat bahwa masyarakat / responden menilai bahwa secara umum perilaku petugas dalam memberikan pelayanan sudah baik dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat / responden. Meskipun demikian, unsur pelayanan ini hendaknya dapat ditingkatkan hingga

dapat mencapai kategori Sangat Baik (A), antara lain melalui penempatan petugas yang sesuai untuk pelayanan, pemberian pelatihan secara rutin dan berkelanjutan mengenai pelayanan publik kepada petugas pelayanan, pemberian insentif khusus untuk petugas pelayanan, pemberian reward / apresiasi untuk petugas pelayanan terbaik, pemberian punishment / hukuman untuk petuga pelayanan yang buruk, serta melakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang.

Unsur pelayanan yang berada pada urutan keempat yaitu Kompetensi Pelaksana dengan nilai 3,35 yang berada pada kategori Baik (B). Dari hasil ini dapat dilihat bahwa masyarakat / responden menilai bahwa secara umum Kompetensi/Kemampuan Petugas Pelayanan yang ditempatkan untuk memberikan pelayanan sudah sesuai dan menguasai tugasnya dengan baik. Namun demikian, unsur pelayanan ini hendaknya dapat ditingkatkan hingga dapat mencapai kategori Sangat Baik (A), antara lain melalui penempatan petugas yang sesuai untuk pelayanan, pemberian pelatihan terkait tugas pokok dan fungsi, pemberian pelatihan mengenai perkembangan teknologi terkait pelayanan atau pelatihan yang terkait, pemberian pelatihan secara rutin dan berkelanjutan mengenai pelayanan publik kepada petugas pelayanan, pemberian insentif khusus untuk petugas pelayanan, pemberian reward / apresiasi untuk petugas pelayanan terbaik, pemberian punishment / hukuman untuk petuga pelayanan yang buruk, serta melakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang.

Unsur pelayanan yang berada pada urutan kelima yaitu Persyaratan dengan nilai 3,30 yang berada pada kategori Baik (B). Dari hasil ini dapat dilihat bahwa masyarakat / responden menilai bahwa secara umum Persyaratan pelayanan yang ditampilkan atau dimintakan sudah sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dilakukan. Namun demikian, unsur pelayanan ini hendaknya dapat ditingkatkan hingga dapat mencapai kategori Sangat Baik (A), antara lain dengan penyederhanaan persyaratan pelayanan, kemudahan untuk mengakses pelayanan, maupun tampilan informasi tentang persyaratan pelayanan yang lebih jelas dan meluas, misalnya dipajang di ruang layanan, pamflet, brosur, media sosial, media cetak, media massa, dll.

Unsur pelayanan yang berada pada urutan keenam yaitu Sistem, Mekanisme dan Prosedur dengan nilai 3,29 yang berada pada kategori Baik (B). Dari hasil ini dapat dilihat bahwa masyarakat / responden menilai bahwa secara umum prosedur pelayanan yang dilakukan sudah baik dan memudahkan. Namun demikian, masyarakat/responden menganggap belum seluruh prosedur pelayanan diselenggarakan dengan cukup baik dan beberapa masih dirasa menyulitkan / berbelit-belit sehingga unsur pelayanan ini hanya berada pada urutan keenam. Unsur pelayanan ini hendaknya dapat ditingkatkan hingga dapat mencapai kategori Sangat Baik (A), antara lain dengan penyederhaan proses dan prsedur pelayanan, kemudahan untuk mengakses pelayanan, tidak berbelit-belit dalam

pelayanan serat mempermudah prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

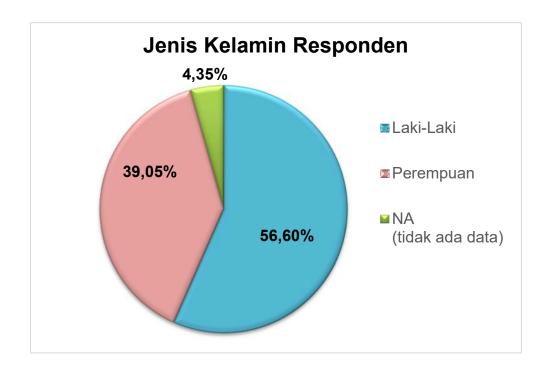
Unsur pelayanan yang berada pada urutan ketujuh yaitu Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dengan nilai 3,29 yang berada pada kategori Baik (B). Dari hasil ini dapat dilihat bahwa masyarakat / responden menilai bahwa secara umum produk pelayanan yang diberikan dapat diketahui dengan cukup mudah oleh masyarakat/responden dan sesuai dengan tugas pokok fungsi penyelenggara. Namun demikian, masyarakat/responden menganggap belum seluruh produk pelayanan dapat diketahui dengan mudah dan perlu upaya lebih untuk mencari informasi terkait hal tersebut sehingga unsur pelayanan ini hanya berada pada urutan keenam atau urutan tiga terendah. Unsur pelayanan ini hendaknya dapat ditingkatkan hingga dapat mencapai kategori Sangat Baik (A), antara lain dengan tampilan informasi terkait produk layanan harus dibuat lebih jelas dan meluas, misalnya dipajang di ruang layanan, pamflet, brosur, media sosial, media cetak, media massa, dll, serta kemudahan untuk mengakses pelayanan.

Unsur pelayanan yang berada pada urutan kedelapan atau dua terendah, yaitu Wkatu Penyelesaian dengan nilai 3,25. Meskipun berada pada kategori Baik (B) dan dinilai umum oleh masyarakat/responden sudah cukup baik. secara namun masyarakat/responden menganggap pelayanan diselenggarakan masih agak lama / belum terlalu cepat, beberapa hal masih dirasa menyulitkan / berbelit-belit sehingga unsur pelayanan ini hanya berada pada urutan kesembilan dan menjadi unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah. Unsur pelayanan ini hendaknya dapat ditingkatkan hingga dapat mencapai kategori Sangat Baik (A), antara lain dengan identifikasi faktor apakah yang membuat kecepatan pelayanan mendapatkan nilai terendah disbanding unsur lainnya, pakah dari prosedurnya atau petugasnya, selain itu hal-hal yang dapat dilakukan adalah penempatan petugas yang sesuai untuk pelayanan, pemberian pelatihan secara rutin dan berkelanjutan mengenai pelayanan publik kepada petugas pelayanan, pemberian insentif khusus untuk petugas pelayanan, pemberian reward / apresiasi untuk petugas pelayanan terbaik, pemberian punishment / hukuman untuk petuga pelayanan yang buruk, penyederhaan proses dan prsedur pelayanan, kemudahan untuk mengakses pelayanan, tidak berbelit-belit dalam pelayanan serat mempermudah prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang. Dibandingkan tahun sebelumnya (2019), terdapat peningkatan pada unsur ini dari yang sebelumnya berada pada peringkat terbawah (urutan ke-9) menjadi peringkat dua terbawah (urutan ke-8). Hal ini disebabkan adanya penyederhanaan alur pelayanan pada standar pelayanan maupun penyederhanaan pada SOP.

Unsur pelayanan yang berada pada urutan kesembilan atau terendah yaitu Sarana dan Prasarana dengan nilai 3,24 yang berada pada kategori Baik (B). Dari hasil ini dapat dilihat bahwa masyarakat / responden menilai bahwa secara umum kualitas sarana dan

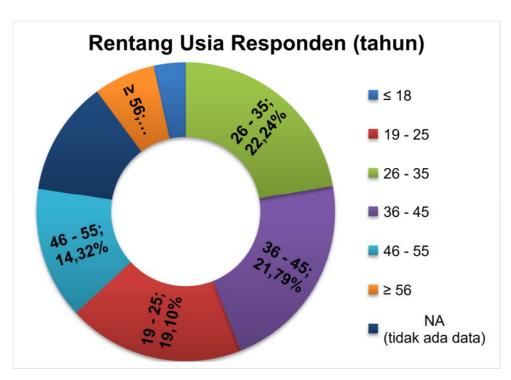
prasarana terkait pelayanan publik Pemprov Kalbar sudah cukup baik. Namun demikian, masyarakat/responden berharap kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik tersebut dapat lebih ditingkatkan sehingga akan lebih memudahkan dan nyaman bagi masyarakat/responden. Unsur pelayanan ini hendaknya dapat ditingkatkan hingga dapat mencapai kategori Sangat Baik (A), antara lain dengan memaksimalkan penggunaan sarana prasaranan yang ada, mengadakan sarana prasaranan yang belum tersedia atau belum memadai, meningkatkan kualitas dan kenyamanan sarana dan prasarana terkait pelayanan publik misalnya perbaikan/renovasi gedung atau pembangunan ruang khusus pelayanan, kenyamanan ruang tunggu/ruang pelayanan seperti penyediaan pendingin udara, sofa / kursi empuk, bahan baca, internet gratis, air minum / permen, televisi, ruang laktasi, tempat bermain anak, tempat sholat, tempat parkir, dll., selain itu perlu juga diperhatikan fasilitas dan pelayanan untuk pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti prioritas layanan, ram, jalur landa, tambatan, kursi roda, toiet khusus, parkir khusus, dll, serta kemudahan untuk mengakses pelayanan, maupun pembangunan mal pelayanan publik.

Jumlah responden sebanyak total 4.901 (empat ribu sembilan ratus satu) orang yang memberikan pendapatnya mengenai kepuasan terhdap penyelenggaraan pelayanan publik Pemprov Kalbar. Dengan demikian terdapat raya-rata 47 orang per UPP yang menjadi responden dalam SKM ini. Adapun profil latar belakang responden tergambar sebagai berikut:



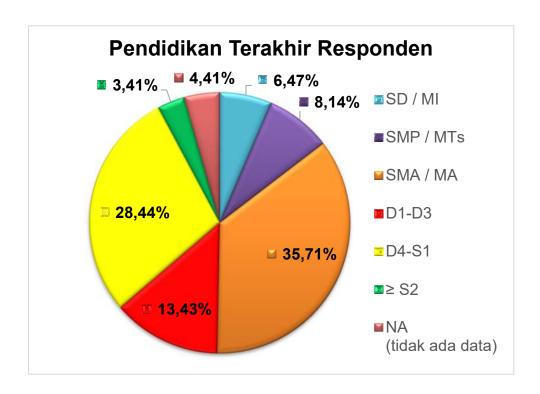
		Jen	nis Kelamin Re	esponden		
Laki	- Laki	Pere	mpuan	•	da data atau si kuesioner)	Jumlah (orang)
Jumlah (orang)	Persentase	Jumlah (orang)	Persentase	Jumlah (orang)	Persentase	
2.774	56,60 %	1.914	39,05 %	213	4,35 %	4.091

Jenis kelamin responden didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 56,60 % atau 2.774 orang. Adapun untuk responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 39,05 % atau 1.914 orang. Dari data tersebut juga terdapat sebanyak 4,35 % atau 213 orang yang tidak mengisi jenis kelamin atau data laporan yang disampaikan tidak lengkap.



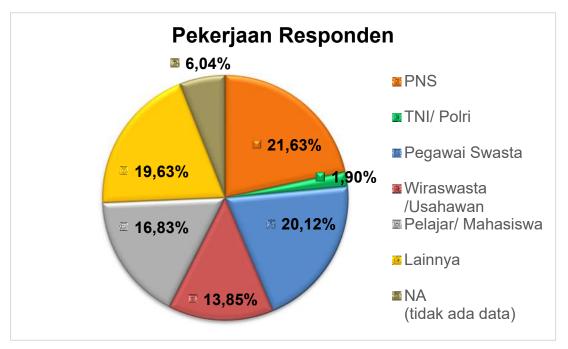
		Renta	ıng Usia R	esponden ((tahun)										
	≤ 18 19 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 ≥ 56 NA*														
Jumlah	mlah 170 936 1.090 1.068 702 327 608														
%	3,47 %	19,10 %	22,24 %	21,79 %	14,32 %	6,67 %	12,41 %								
	*)	NA : (tidak	ada data ata	au tidak me	ngisi kuesio	ner)									

Untuk usia responden bervariasi dan mayoritas berusia antara 26-35 tahun sebanyak 22,24 % atau 1.090 orang. Untuk rentang usia responden lain yaitu 36-45 tahun sebanyak 21,79 % atau 1.068 orang, 19-25 tahun sebanyak 19,10 % atau 936 orang, 46-55 tahun sebanyak 14,32 % atau 702 orang, \leq 18 tahun sebanyak 3,47 % atau 170 orang, dan \geq 56 tahun sebanyak 6,67 % atau 327 orang. Adapun responden yang tidak mengisi data usia ataupun data laporan yang disampaikan tidak lengkap adalah sebanyak 12,41 % atau 608 orang.



		P	endidikan R	esponden											
	SD/MI SMP/MTs SMA/K/MA D-1/D-3 D-4/S-1 ≥ S-2 NA*														
Jumlah	317	399	1.750	658	1.394	167	216								
%	6,47 %	8,14 %	35,71 %	13,34 %	28,44 %	3,41 %	4,41 %								
	*)	NA : (tidak a	ada data atau	tidak meng	isi kuesione	er)									

Mayoritas pendidikan responden yang mengisi kuesioner SKM adalah SMA dengan persentase 35,71 % atau 1.750 orang. Setelah itu berturut-turut yaitu D4-S1 sebanyak 28,44 % atau 1.394 orang, D1-D3 sebanyak 13,34 % atau 658 orang, SMP sebanyak 8,14 % atau 399 orang, SD sebanyak 6,47 % atau 317 orang, dan \geq S2 sebanyak 3,41 % atau 167 orang. Adapun responden yang tidak mengisi data Pendidikan terkahir atau data laporan yang disampaikan tidak lengkap adalah sebanyak 4,41 % atau216 orang.



			Pekerja	an Responde	n										
	PNS	TNI/	Pegawai	Wirausaha/	Pelajar/	Lainnya	NA*								
	POLRI Swasta Wiraswasta Mahasiswa														
Jumlah	1.060	93	986	679	825	962	296								
%	21,36%	1,90%	20,12%	13,85%	16,83%	19,63%	6,04%								
	*) NA : (tid	ak ada data	atau tidak mer	ngisi kuesioner)									

Latar belakang pekerjaan responden yang mengisi formulir kuesioner SKM cukup beraneka ragam. Hal ini terlihat dari tidak adanya responden dengan latar belakang yang dominan. Untuk mayoritas latar belakang responden yaitu PNS dengan persentase 21,36 % atau 1.060 orang. Pegawai Swasta dengan persentase 20,12 % atau 986 orang menempati urutan mayoritas kedua. Selanjutnya pilihan pekerjaan Lainnya dengan persentase sebanyak 19,63 % atau 962 orang. Pilihan pekerjaan ini bervariasi yaitu mulai dari ibu rumah tangga, petani, tenaga kontrak/pegawai honorer, pegawai BUMN/BUMD, dan lainnya. Selain itu, terdapat 16,83 % responden yang berlatarbelakang Pelajar/Mahasiswa, 13,85 % atau 679 orang berprofesi sebagai wirausaha/wiraswasta, 1,90 % atau 93 orang TNI/POLRI. Selain itu, terdapat sebanyak 6,04 % atau 296 orang responden yang tidak mengisi data mengenai pekerjaan atau data laporan yang disampaikan tidak lengkap.

Beragamnya data profil responden dengan jumlah total 4.901 (empat ribu sembilan ratus satu) orang yang mengisi kuesioner SKM cukup untuk mewakili para penerima layanan. Hal ini selain dilihat dari jumlah total responden yang cukup banyak, juga terlihat dari beragamnya latar belakang responden, baik dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan, maupun pekerjaan. Adapun rincian data responden pada setiap Perangkat Daerah, Biro, dan UPT adalah sebagai berikut:

DATA RESPONDEN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

							sia (tahu	n)				enis Kelamir				Ponde	dikan Tei	rakhir						Pekerjaar				
						l	sia (tanu	n) 			J	enis Keiamir	1			Pena	uikan rei	Такпіг						Рекегјааг	1			
No) .	Perangkat Daerah / Biro / UPT	Jumlah Respon den	≤ 18	19 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 55	≥ 56	NA	Laki- Laki	Perempuan	NA	SD / MI	SMP / MTs	SMA / MA	D1- D3	D4- \$1	≥ \$2	NA	PNS	TNI/ Polri		Wiraswasta /Usahawan		Lainnya	NA	IKM
1	1.	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat																										86,07
2		Biro Pemerintahan	25	0	8	11	5	1	0		15	10		0	0	4	0	21	0		22	0	3	0	0	0		87,69
3		2. Biro Hukum	25							25			25							25							25	82,58
4		Biro Kesejahteraan Rakyat	50							50	38	12		0	0	18	4	28	0		20	0	8	4	18	0		84,67
5		4. Biro Perekonomian	25							25	15	10		0	0	5	3	15	2		20	0	4	1	0	0		85,36
6		Biro Administrasi Pembangunan	49	0	1	11	21	13	3		30	19		0	0	27	5	17	0		49	0	0	0	0	0		88,52
7		6. Biro Pengadaan Barang/Jasa	50	0	15	18	11	6	0		41	9		0	0	18	12	18	2		1	0	19	28	1	1		90,13
8		7. Biro Organisasi	25	0	0	9	9	6	1		17	8		0	0	4	0	17	4		23	0	0	0	0	2		87,14
9		8. Biro Umum	25	2	7	5	5	5	1		16	9		0	0	8	5	12	0		5	1	9	1	8	1		86,47
10		Biro Administrasi Pimpinan	25							25			25							25							25	82,10
	2.	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat	50	0	3	17	0	21	9		30	20		0	0	20	18	12	0		31	0	14	0	5	0		83,75
12	3.	Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	25							25			25							25							25	82,36
13	4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70	1	11	26	17	11	4		42	28		0	3	19	5	36	7		26	3	8	3	12	18		90,82
14		UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan																										
15		2. UPT Taman Budaya	20	0	1	8	9	2	0		17	3		0	0	8	7	5	0		1	0	12	6	1	0		70,90
16		3. UPT Museum	100	34	23	9	13	7	5	9	25	54	21	3	1	41	6	29	1	19	5	1	12	12	43	7	20	85,30
17		UPT Satuan Pendidikan SMA/SMK sebanyak 370																										
18		5. UPT Satuan Pendidikan Khusus sebanyak 13																										
19	5.	Dinas Kesehatan	30	0	21	9	0	0	0		12	18		0	0	0	16	14	0		20	0	0	0	5	5		82,78
20		UPT Laboratorium Kesehatan																										

		UPT Pelayanan		1	l	l		ı	1				1	1	1	ı									l		
21		Kesehatan Paru	357	29	46	45	68	62	107		211	146	51	96	144	22	43	1		18	5	109	16	61	148		80,96
22		UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat																									
23		UPT Pelatihan Kesehatan																									
24		5. UPT Akper Sintang																									
25	6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50	0	11	11	15	11	2		39	11	0	1	9	15	24	1		6	0	26	13	0	5		84,42
26		UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	31	0	4	10	15	2	0		26	5	0	0	4	10	17	0		3	0	18	10	0	0		87,82
27	7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	57	0	8	22	18	7	2		48	9	1	2	13	8	28	5		1	2	14	25	5	10		81,21
28	8.	Dinas Sosial	35	2	5	3	18	7	0		17	18	14	2	7	4	8	0								35	88,88
29		UPT Panti Sosial dan Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma	100	0	10	7	8	18	57		55	45	41	22	25	7	5	0		18	5	25	5	12	35		76,70
30		UPT Panti Sosial dan Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma	50	1	42	2	0	0	5		18	32	6	0	24	19	1	0		2	0	0	1	44	3		82,03
31		UPT Panti Sosial Anak																									
32	9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	141	0	17	48	38	36	2		106	35	8	18	63	16	36	0		0	0	11	57	40	33		84,60
33		UPT Latihan Kerja Industri																									
34		UPT Latihan Kerja Industri Entikong																									
35		UPT Laboratorium Kesehatan Kerja																									
36		UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	30							30	16	14	11	0	11	1	6	1								30	85,75
37		5. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II																									
38	10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25	1	6	8	10	0	0		9	16	0	0	5	0	17	3		7	0	1	2	15	0		92,80
39	11.	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	55	3	20	15	11	6	0		34	21	2	0	22	7	24	0		4	0	18	14	9	10		89,36
40		UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	120	6	46	44	19	5	0		59	61	2	2	42	30	42	2		9	1	43	19	34	14		86,30
41		UPT Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak																									
42	12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25	0	1	4	6	13	1		15	10	0	0	1	0	17	7		18	0	6	1	0	0		88,58
43	13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25	0	8	11	6	0	0		16	9	0	0	5	3	15	0	2	13	0	0	0	5	7		88,47
44	14.	Dinas Perhubungan	100	3	15	27	35	17	3		74	26	1	7	56	17	18	1		3	0	45	24	12	16		79,95
45	15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	25	1	9	8	5	2	0		21	4	0	0	7	1	15	2		10	1	4	2	6	2		91,13

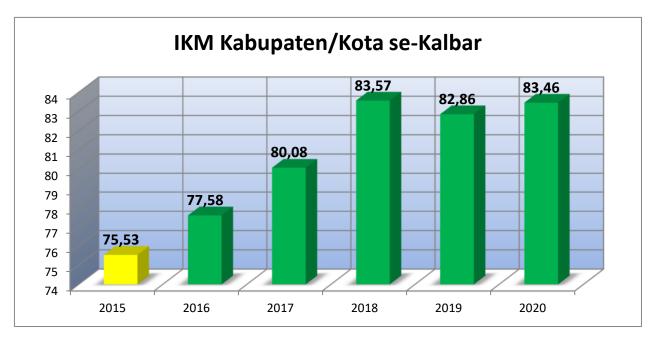
		1 =																									
46	16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30	0	9	8	9	1	3		19	11	0	0	7	4	17	2		3	0	9	2	7	9		88,43
47		UPT Pelatihan Koperasi	30	0	6	7	12	5	0		9	21	1	4	21	0	4	0		0	0	1	25	1	3		86,86
48	17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	66	0	29	24	7	6	0		36	30	0	0	25	8	30	3		1	0	39	12	14	0		88,09
49	18.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	100	10	24	18	18	4	3	23	44	56	1	0	40	19	30	10		7	6	32	16	20	19		84,08
50	19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	110							110	34	76	1	0	50	23	32	4		4	6	8	4	76	7	5	70,89
51	20.	Dinas Kelautan dan Perikanan	26							26	15	11	0	0	15	3	8	0		5	0	6	4	10	1		87,20
52		UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	25	2	18	1	4	0	0		8	17	0	0	5	0	17	3		5	1	0	1	9	9		84,58
53		UPT Pelabuhan Perikanan	52	3	11	2	8	20	8		45	7	7	19	8	11	4	3		3	0	7	9	9	24		86,56
54		UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut	25	0	1	2	8	9	5		22	3	3	2	16	1	2	0	1	2	0	6	14	0	3		85,91
55	21.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	115	7	47	25	24	12	0		67	48	1	1	50	19	42	2		19	0	54	19	21	2		82,58
56		UPT Pembenihan Tanaman Pangan	25	0	1	8	15	1	0		21	4	5	3	13	2	2	0		3	0	1	6	0	15		76,70
57		UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	25	0	6	12	5	2	0		18	7	2	2	6	1	13	1		13	0	0	0	0	12		80,92
58		UPT Balai Benih Induk Hortikultura	100	3	34	30	21	12	0		56	44	13	18	36	14	19	0		8	5	15	22	24	26		83,72
59		UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	100	0	11	43	27	17	2		76	24	28	34	30	1	7	0		6	4	4	4	3	79		81,42
60		UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih	111	0	2	23	60	26	0		72	39	3	10	39	4	49	2	4	60	0	3	0	1	47		76,63
61	22.	Dinas Perkebunan	32	0	7	10	9	6	0		21	11	0	0	10	1	19	2		6	1	18	0	4	3		88,86
62		UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	25	0	0	9	6	6	3	1	21	4	0	0	14	0	9	2		3	0	3	0	0	16	3	85,03
63	23.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	40	7	7	7	7	6	6		27	13	0	0	8	3	27	2		3	0	28	3	1	5		82,76
64		UPT KPH Wilayah Mempawah																									
65		2. UPT KPH Wilayah Landak																									
66		UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Selatan																									
67		UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur																									
68		5. UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara																									
69		6. UPT KPH Wilayah Kayong																									
70		UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan																									
71		UPT KPH Wilayah Ketapang Utara	25							25	15	10	1	3	15	1	5	0								25	84,80

72		9. UPT KPH Wilayah Kubu Raya	18	0	4	2	6	6	0		15	3		0	0	3	1	14	0		5	1	3	2	3	4		82,33
73		10. UPT KPH Wilayah Melawi	10	0	2	3	4	1	0		7	3		0	1	4	0	4	1		4	0	0	1	0	5		76,87
74		11. UPT KPH Wilayah Sambas																										
75		12. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat																										
76		13. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	30	0	4	8	6	9	3		26	4		2	2	12	2	8	4		8	2	7	6	1	6		87,14
77		14. UPT KPH Wilayah Sekadau																										
78		15. UPT KPH Wilayah																										
79		Bengkayang 16. UPT KPH Wilayah																										
80		Sintang Utara 17. UPT KPH Wilayah	50	0	7	19	5	19	0		39	11		2	4	26	2	16	0		19	2	2	1	7	19		80.81
81	24.	Sintang Timur Dinas Energi dan Sumber	30							30			30							30							30	88,32
82	25.	Daya Mineral Dinas Perindustrian dan	37	0	2	11	14	7	3		32	5		0	0	7	10	18	2		0	0	25	11	0	1		92.93
83	20.	Perdagangan 1. UPT Industri Pangan	35	0	2	13	14	4	2		2	33		9	4	18	1	3	0		0	0	1	7	1	26		79,92
84		Olahan dan Kemasan 2. UPT Pengujian dan			2	10	17	_				33		3	7	10	'	3			0	0	'	,	•	20		73,32
	25	Sertifikasi Mutu Barang Satuan Polisi Pamong	0.5		•		_				47	•					1	40			45			_				04.50
85	26.	Praja Badan Perencanaan	25	0	6	9	7	3	0		17	8		0	0	1		16	6	1	15	0	3	5	1	1		81,50
86	27.	Pembangunan Daerah	100	3	38	31	20	8	0		37	63		0	1	43	12	43	1		29	3	8	18	36	6		84,03
87	28.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	50							50	28	22		0	0	9	13	17	11								50	84,47
88	29.	Badan Pendapatan Daerah	40	0	6	18	11	5	0		21	19		0	0	2	9	25	4		32	0	5	3	0	0		83,44
89		UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I	50	0	15	14	12	9	0		30	20		0	4	14	11	17	4		11	4	13	9	13	0		82,14
		1b. SAMSAT Pontianak Wilayah II	25	0	6	6	7	5	1		15	10		0	5	9	6	4	1		3	0	9	6	6	1		80,70
		1c. SAMSAT Kubu Raya	25	0	9	9	3	4	0		15	10		0	1	7	6	9	2		8	2	5	5	5	0		78,81
90		UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang	25	2	5	6	7	5	0		14	11		0	2	14	3	5	1		4	1	6	6	8	0		81,92
		2b. SAMSAT Bengkayang	25	3	10	2	6	2	2		14	11		1	2	10	4	7	1		3	1	6	4	9	1	1	79,81
		2c. SAMSAT Sambas	25	1	5	10	5	4	0		16	9		0	3	14	5	3	0		5	0	6	4	10	0		80,70
91		UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Mempawah	25	0	2	7	10	6	0		17	8		3	0	9	5	7	1		7	2	4	3	9	0		78,92
		3b. SAMSAT Ngabang	25	3	6	7	6	3	0		13	12		1	5	10	3	5	1		7	1	5	2	9	1		80,03
92		UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau	25	1	9	9	3	3	0		12	13		0	1	14	6	4	0		5	1	9	5	5	0		80,48

		4b. SAMSAT Sekadau	25	3	4	5	8	5	0		14	11		0	6	10	5	4	0		3	1	13	2	6	0		79,48
93		5. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sintang	25	0	15	4	3	3	0		15	10		1	1	12	5	5	1		5	0	4	8	7	1		81,03
		5b. SAMSAT Melawi	25	0	8	5	8	3	1		18	7		3	1	12	3	5	1		5	0	2	9	9	0		79,81
94		6. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kapuas Hulu	25	1	7	7	7	3	0		15	10		0	3	10	3	8	1		8	1	10	4	2	0		81,36
95		7. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang	25	1	12	4	6	2	0		21	4		0	2	13	4	5	1		6	2	9	4	4	0		81,70
		7b. SAMSAT Kayong Utara	25	2	8	9	5	1	0		16	9		0	3	13	4	5	0		4	1	9	4	7	0		79,03
96	30.	Badan Kepegawaian Daerah	77	2	10	22	13	10	0	20	43	34		0	0	17	12	40	8		50	0	8	0	6	8	5	82,51
97	31.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80							80			80							80	80							88,31
98	32.	Badan Penelitian dan Pengembangan	58	0	20	6	21	11	0		36	22		0	0	4	29	20	5		32	0	12	8	5	1		84,45
99	33.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	32	0	12	8	6	6	0		24	8		0	0	12	3	17	0		15	0	3	0	11	0	3	80,21
100	34.	Badan Penghubung	100	0	0	4	37	41	18		45	55		0	0	0	0	87	13		89	0	11	0	0	0		77,55
101	35.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67	3	27	13	8	5	1	10	37	30		0	0	8	31	25	3		16	2	2	2	37	8		76,66
102	36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35							35	21	14		0	0	14	8	6	7		1	2	5	6	4	17		85,23
103	37.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso	364	16	84	96	89	60	19		187	177		31	30	224	50	24	5		61	13	80	51	34	125		78,04
104	38.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi	181	9	18	42	43	34	26	9	122	52	7	46	44	58	12	15	2	4	17	5	33	33	18	61	14	80,12
105	39.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong	200	5	22	64	66	24	19		102	98		12	24	99	33	27	5		17	4	25	65	16	73		80,12
		Jumlah	4.901	170	936	1.090	1.068	702	327	608	2.774	1.914	213	317	399	1.750	658	1.394	167	216	1.060	93	986	679	825	962	296	
		Persentase		3,47 %	19,10 %	22,24 %	21,79 %	14,32 %	6,67 %	12,41 %	56,60 %	39,05%	4,35 %	6,47%	8,14 %	35,71 %	13,43 %	28,44 %	3,41 %	4,41 %	21,63 %	1,90 %	20,12%	13,85%	16,83%	19,63 %	6,04 %	
			Jumlah Respond en	≤ 18	19 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 55	≥ 56	NA	L	P	NA	SD	SMP	SMA	D1-D3	D4-S1	>\$2	NA	PNS	TNI/ Polri	Pegaw ai Swast a	Wiraswas ta /Usahawa n	Pelajar/ Mahasis wa	Lainn ya	NA	IKM
	Usia (tahun)					J	enis Kelamii	Penddikan Terakhir					Pekerjaan															

2.2. PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE-KALIMANTANBARAT

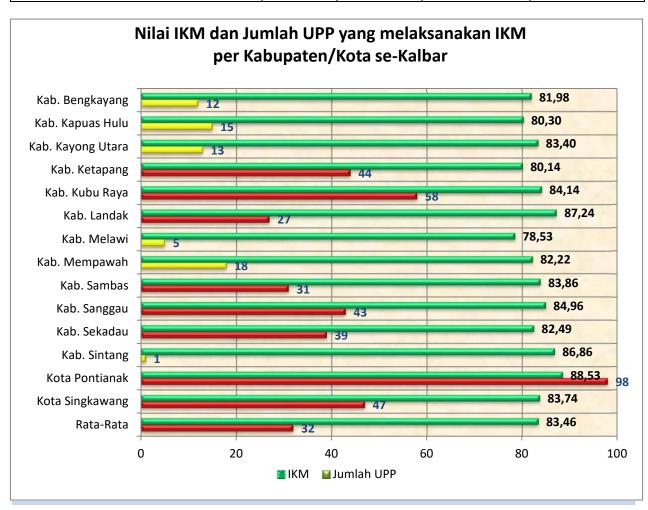
Dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, seluruhnya (100 %) telah menyampaikan Laporan SKM Tahun 2020. IKM rata-rata Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah 83,46 dengan kategori Baik.



Nilai rata-rata IKM Kabupaten/Kota se-Kalbar pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 0,60 poin dari 82,86 (2019) menjadi 83,46 (2020). Namun demikian nilai rata-rata capaian di tahun 2020 ini masih lebih rendah dari nilai rata-rata capaian di tahun 2018 sebesar 83,57 atau masih terdapat selisih 0,11 poin. Hal ini disebabkan oleh menurunnya nilai IKM pada beberapa Kabupaten msekipun terdapat pula Kabupaten/Kota yeng mengalami peningkatan nilai IKM pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Meskipun demikian, dalam 5 (lima) tahun terakhir, nilai rata-rata IKM Kabupaten/Kota se-Kalbar sejak tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 dengan nilai 75,53 meningkat 2,05 poin menjadi 77,58 pada tahun 2016, setelah itu meningkat 2,5 poin menjadi 80,08 pada tahun 207, kemudian meningkat 3,49 poin menjadi 83,57 pada tahun 2018, dan terjadi sedikit penurunan sebesar 0,71 poin pada tahun 2019 menjadi 81,86. Pada tahun 2020, nilai rata-rata capaian meningkat kembali sebesar 0,60 poin sehingga nilai rata-rata IKM Kabupaten/Kota se-Kalbar pada tahun 2020 menjadi 83,46.

Adapun nilai IKM per Kabupaten/Kota se-Kalbar beserta jumlah UPP yang melaksanakan IKM per Kabupaten /Kota se-Kalbar adalah sebagai berikut :

No.	Kabupaten/Kota	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kategori	Jumlah UPP yang melaksanakan SKM
1	Kabupaten Bengkayang	81,98	В	BAIK	12
2	Kabupaten Kapuas Hulu	80,30	В	BAIK	15
3	Kabupaten Kayong Utara	83,40	В	BAIK	13
4	Kabupaten Ketapang	80,14	В	BAIK	44
5	Kabupaten Kubu Raya	84,14	В	BAIK	58
6	Kabupaten Landak	87,24	В	BAIK	27
7	Kabupaten Melawi	78,53	В	BAIK	5
8	Kabupaten Mempawah	82,22	В	BAIK	18
9	Kabupaten Sambas	83,86	В	BAIK	31
10	Kabupaten Sanggau	84,96	В	BAIK	43
11	Kabupaten Sekadau	82,49	В	BAIK	39
12	Kabupaten Sintang	86,86	В	BAIK	1
13	Kota Pontianak	88,53	А	SANGAT BAIK	98
14	Kota Singkawang	83,74	В	BAIK	47
RATA-RA	TA IKM KABUPATEN/KOTA SE-KALBAR	83,46	В	BAIK	



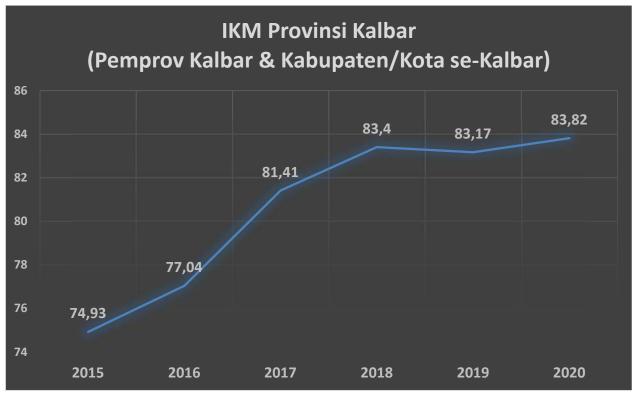
Nilai IKM tertinggi untuk Kabupaten/Kota se-Kalbar Tahun 2020 berada pada Kota Pontianak dengan nilai IKM 88,53 dengan kategori Sangat Baik (A). Kota Pontianak juga menjadi Kabupaten/Kota se-Kalbar yang memiliki UPP terbanyak dalam hal pelaksanaan dan pelaporan SKM yaitu sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) UPP yang terdiri dari Perangkat Daerah, UPT, Kecamatan, dan Puskesmas.

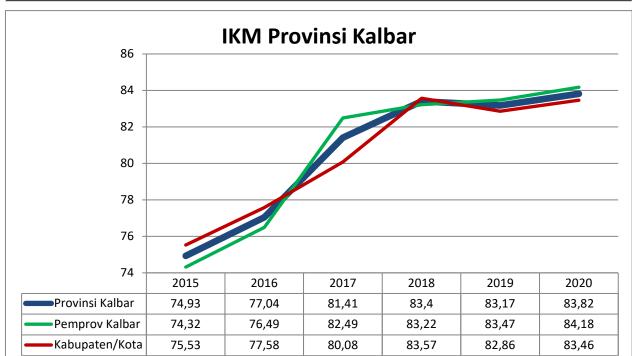
Kabupaten/Kota se-Kalbar yang memiliki jumlah UPP terbanyak kedua dan ketiga dalam hal pelaksanaan SKM adalah Kabupaten Kubu Raya sebanyak 58 (lima puluh delapan) UPP dan Kota Singkawang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) UPP. Selain itu secara beruturut-turut, Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah UPP relatif banyak dalam pelaksanaan SKM adalah : Kabupaten Ketapang sebanyak 44 (empat puluh empat) UPP, Kabupaten Sanggau sebanyak 43 (empat puluh tiga) UPP, Kabupaten Sekadau sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) UPP, Kabupaten Sambas sebanyak 31 (tiga puluh satu) UPP, dan Kabupaten Landak sebanyak 27 (dua puluh tujuh) UPP. Adapun Kabupaten/Kota yang perlu meningkatkan jumlah UPP yang melaksanakan SKM adalah : Kabupaten Mempawah yang saat ini baru sebanyak 18 (delapan belas) UPP, Kabupaten Kapuas Hulu yang saat ini baru sebanyak 15 (lima belas) UPP, Kabupaten Kayong Utara yang saat ini baru sebanyak 13 (tiga belas) UPP, Kabupaten Bengkayang yang saat ini baru sebanyak 12 (dua belas) UPP, Kabupaten Melawi yang saat ini baru sebanyak 5 (lima) UPP, dan Kabupaten Sintang yang saat ini baru sebanyak 1 (satu) UPP.

Nilai IKM seluruh Kabupaten/Kota se-Kalbar berada pada kategori Baik (B), terkecuali Kota Pontianak yang telah berada pada kategori A (Sangat Baik) Hal ini perlu mendapatkan apresiasi karena selain dapat melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan SKM Tahun 2020 secara baik dan tepat waktu, seluruh Kabupaten/Kota juga secara umum dinilai Baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik yang berasal dari kepuasan masyarakat / responden.

2.3. PROVINSI KALIMANTAN BARAT (PEMPROV & KABUPATEN/KOTA SE- KALBAR)

Nilai IKM Provinsi Kalbar Tahun 2020 yang merupakan nilai rata-rata dari IKM Pemprov Kalbar (84,18) dan nilai IKM Kabupaten/Kota (83,46) adalah 83,82. Nilai ini meningkat 0,65 poin dari tahun 2019, yang disebabkan oleh meningkatnya nilai rata-rata IKM Kabupaten/Kota se-Kalbar dan meningkatnya nilai IKM Pemprov Kalbar. Dalam 6 (enam) tahun terkahir, nilai IKM Provinsi mengalami peningkatan dari semula 74,93 pada tahun 2015 hingga pada tahun 2020 meningkat menjadi 83,82 sekaligus menjadi nilai IKM tertinggi yang pernah diraih oleh Provinsi Kalbar.





INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PROVINSI KALIMANTAN BARAT

	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) + / -								
No.	Pemerintah Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	Mutu Pelaya- nan	dari tahun lalu	Keterangan
Per	nerintah Provinsi Kalbar	76,49	82,49	83,22	83,47	84,18	B (Baik)	0,71	Total Jumlah Responden: 4.901 orang Nilai A: 14 UPP UPP yang melaksanakan SKM: 2020: 39 PD (100 %) 9 Biro (100 %) 31 UPT (57,41 %) 2019: Nilai A: 10 UPP 36 PD (97,30 %) 8 Biro (88,89 %) 31 UPT (45,59 %)
Pe	Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar		80,08	83,57	82,86	83,46	B (Baik)	0,60	Kab/Kota yang melaksanakan SKM: 2020: 100 % 2019: 100 % 2018: 92,86 % 2017: 85,71 % 2016: 78,57 %
1	Kabupaten Bengkayang	75,77	76,95	79,03	81,20	81,98	В	0,78	12 UPP
2	Kabupaten Kapuas Hulu	67,80	NA	81,32	79,44	80,30	В	0,86	15 UPP
3	Kabupaten Kayong Utara	NA	79,27	82,87	82,20	83,40	В	1,20	13 UPP
4	Kabupaten Ketapang	NA	80,95	85,89	80,08	80,14	В	0,06	44 UPP
5	Kabupaten Kubu Raya	76,90	80,37	82,37	83,48	84,14	В	0,66	58 UPP
6	Kabupaten Landak	75,53	72,16	86,55	86,70	87,24	В	0,54	27 UPP
7	Kabupaten Melawi	NA	NA	NA	80,49	78,53	В	-1,96	5 UPP
8	Kabupaten Mempawah	75,72	77,16	80,40	82,45	82,22	В	-0,23	18 UPP
9	Kabupaten Sambas	81,50	82,69	82,79	82,54	83,86	В	1,32	31 UPP
10	Kabupaten Sanggau	82,02	81,91	82,63	83,91	84,96	В	1,05	43 UPP
11	Kabupaten Sekadau	80,10	78,91	81,85	82,50	82,49	В	0,01	39 UPP
12	Kabupaten Sintang	75,92	86,26	90,55	84,52	86,86	В	2,34	1 UPP
13	Kota Pontianak	82,55	82,81	87,55	87,86	88,53	Α	0,67	98 UPP
14	Kota Singkawang	79,67	81,54	82,57	82,63	83,74	В	1,11	47 UPP
(Pe	OVINSI KALBAR mprov Kalbar & nkab/Pemkot se-Kalbar)	77,04	81,41	83,40	83,17	83,82	B (Baik)	0,65	

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) TERHADAP HASIL SKM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Terhadap hasil SKM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, maka dapat disusun rencana aksi tindak lanjut SKM dari unsur penilaian yang terendah hingga tertingga secara berurutan sebagai berikut :

No	Unsur Penilaian	Nilai IKM	Saran / Keluhan dan Kondisi Umum		Tidak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Sarana dan Prasarana	3,24 (81,13) B (Baik)	- Secara umum sudah Baik karena telah berada pada kategori Baik dengan nilai 3,24 (81,13) - Secara umum Sarpras perlu perbaikan / peningkatan - Secara umum Sarpras perlu ditingkatkan kenyamanannya	a. b. c. f. g. h. i.	Menyurati Perangkat Daerah/Biro/UPT Mengadakan sarana dan prasarana yang belum tersedia atau belum memadai Meningkatkan kualitas dan kenyamanan sarana dan prasarana terkait pelayanan publik untuk kenyamanan pengguna layanan, antara lain: sofa / kursi khusus ruang tunggu, tv, pendingin ruangan, bahan bacaan, minuman/permen, ruang tunggu yang bersih dan rapi, toilet yang bersih dan harum, wifi gratis, charger box, ruang laktasi, tempat bermain anak, dll. Mendorong unit kerja untuk menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan publik Mendorong unit kerja untuk melengkapi fasilitas terkait pelayanan publik Meningkatkan fasilitas dan pelayanan untuk pengguna berkebutuhan khusus. Kajian untuk pembentukan Mal Pelayanan Publik Monev dan binwas secara berkala dan berjenjang Sarpras yang sudah baik dan representatif untuk tetap dipertahankan dan dirawat	Jk. Pendek: Semester 1 2021 (a, d, e, f, h) Jk. Menengah: Semester 2 2021 (b, c, d, e, f, h, i) Jk. Panjang: Tahun 2022 (b, c, f, g)	Biro Organisasi dan PD/Biro/UPT terkait

2	Waktu Penyelesaian	3,25 (81,33) B (Baik)	 Secara umum sudah Baik karena telah berada pada kategori Baik dengan nilai 3,25 (81,33) Petugas pelayanan dirasa lambat dalam memberikan pelayanan Waktu penyelesaian suatu layanan 	c. d.	yang menghambat atau memperpanjang waktu pelayanan dilakukan pembinaan terhadap petugas pelayanan melalui pemberian pelatihan pelayanan secara rutin dan berkelanjutan, pemberian reward/ apresiasi untuk petugas pelayanan terbaik. Pemberian punishment/hukuman untuk petugas pelayanan yang buruk Penyederhanaan proses bisnis, SOP dan prosedur pelayanan serta standar pelayanan, kemudahan dalam mengakses pelayanan sesuai	Jk. Pendek: Semester 1 2021 (a, g, i), Jk. Menengah: Semester 2 2021 (b, c, d, e) Jk. Panjang: Tahun 2022 (b, f, h)	Biro Organisasi dan PD/Biro/UPT terkait
3	Produk	3,29	dirasa masih belum cepat - Secara umum	i.	dengan ketentuan yang berlaku Menyusun / mengembangkan system / aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat waktu pelayanan Monev dan binwas secara berkala dan berjenjang Menambah jumlah petugas pelayanan Mengurangi waktu tunggu antrian Menampilkan informasi terkait produk	Jk.	Biro
J.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	(82,28) B (Baik)	 Secara umum sudah Baik karena telah berada pada kategori Baik dengan nilai 3,29 (82,28) Informasi produk layanan kurang jelas 	b. c. d.	layanan lebih jelas dan meluas dengan dipajang diruang layanan, pamflet, brosur, media sosial, media cetak, media massa Membuat tampilan lebih menarik sehingga lebih mudah diketahui dan dipahami Kemudahan dalam mengakses pelayanan Menyusun / mengembangkan system / aplikasi yang dapat menampilkan seluruh produk/jenis pelayanan Monev dan binwas secara berkala dan berjenjang	JK. Pendek: Semester 1 2021 (b, e), Jk. Menengah: Semester 2 2021 (a, c) Jk. Panjang: Tahun 2022 (d)	Organisasi dan PD/Biro/UPT terkait
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,29 (82,35) B (Baik)	Secara umum sudah Baik karena telah berada pada kategori Baik dengan nilai 3,29 (82,35) Alur prosedur dirasa berbelit dan susah	c.	Penyederhanaan proses dan prosedur pelayanan Melakukan analisis terhadap hal-hal yang menghambat atau memperpanjang prosedur pelayanan Penyederhanaan proses bisnis, SOP dan prosedur pelayanan serta standar pelayanan, kemudahan dalam mengakses pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menyusun / mengembangkan system / aplikasi yang dapat mempermudah prosedur pelayanan Monev dan binwas secara berkala dan berjenjang Mempermudah akses pelayanan tidak berbelit-belit sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jk. Pendek: Semester 1 2021 (b, e), Jk. Menengah: Semester 2 2021 (a, c, f) Jk. Panjang: Tahun 2022 (d)	Biro Organisasi dan PD/Biro/UPT terkait

5.	Persyaratan	3,30 (82,38) B (Baik)	 Secara umum sudah Baik karena telah berada pada kategori Baik dengan nilai 3,30 (82,38) Persyaratan terlalu banyak 	b. c. d.	Penyederhanaan persyaratan pelayanan Melakukan analisis terhadap persyaratan yang tidak diperlukan Membuat tampilan informasi tentang persyaratan pelayanan yang lebih jelas dan meluas Penyederhanaan proses bisnis, SOP serta standar pelayanan, kemudahan dalam mengakses pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menyusun / mengembangkan system / aplikasi yang dapat mempublikasikan persyaratan pelayanan secara masif Mempublikasikan persyaratan pelayanan pada ruang layanan, brosur, pamphlet, website, media social, media cetak, media massa Monev dan binwas secara berkala dan berjenjang	Jk. Pendek: Semester 1 2021 (b, c, g), Jk. Menengah: Semester 2 2021 (a, d, f) Jk. Panjang: Tahun 2022 (e)	Biro Organisasi dan PD/Biro/UPT terkait
6.	Kompetensi Pelaksana	3,35 (83,70) B (Baik)	 Secara umum sudah Baik karena telah berada pada kategori Baik dengan nilai 3,35 (83,70) Kemampuan petugas untuk lebih ditingkatkan Petugas yang ditempatkan agar yang memiliki kemampuan dan berjiwa melayani 	b. c. d. e.	Melakukan analisis terhadap kesesuaian penempatan posisi petugas pelayanan Penempatan petugas yang sesuai untuk pelayanan Memindahkan petugas yang tidak berjiwa melayani Pemberian pelatihan mengenai perkembangan teknologi terkait pelayanan dilakukan pembinaan terhadap petugas pelayanan melalui pemberian pelatihan pelayanan secara rutin dan berkelanjutan, pemberian reward/ apresiasi untuk petugas pelayanan terbaik. Pemberian punishment/hukuman untuk petugas pelayanan yang buruk Monev dan binwas secara berkala dan berjenjang	Jk. Pendek: Semester 1 2021 (a, b, c, h) Jk. Menengah: Semester 2 2021 (d, e, f, g) Jk. Panjang: Tahun 2022 (d, e, f, g)	Biro Organisasi dan PD/Biro/UPT terkait
7.	Perilaku Pelaksana	3,37 (84,35) B (Baik)	 Secara umum sudah Baik karena telah berada pada kategori Baik dengan nilai 3,37 (84,35) Petugas agar lebih sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan Perilaku petugas untuk menjadi perhatian 	c. d. f. g.	Melakukan analisis terhadap kesesuaian penempatan posisi petugas pelayanan Penempatan petugas yang sesuai untuk pelayanan Memindahkan petugas yang tidak berjiwa melayani dilakukan pembinaan terhadap petugas pelayanan melalui pemberian pelatihan pelayanan publik secara rutin dan berkelanjutan, pemberian reward/ apresiasi untuk petugas pelayanan terbaik. Pemberian punishment/hukuman untuk petugas pelayanan yang buruk Monev dan binwas secara berkala dan berjenjang Pengawasan langsung saat petugas memberikan pelayanan maupun melalui CCTV	Jk. Pendek: Semester 1 2021 (a, b, c, h) Jk. Menengah: Semester 2 2021 (d, e, f, g, h) Jk. Panjang: Tahun 2022 (d, e, f, g)	Biro Organisasi dan PD/Biro/UPT terkait

0	D: /T:f	0.54	0	_	Underly become because the first of	11.	D:
8.	Biaya/Tarif	3,51 (87,80) B (Baik)	 Secara umum sudah Baik karena telah berada pada kategori Baik dengan nilai 3,51 (87,51) Informasi tentang biaya agar ditampilkan lebih jelas 	b. c. d. f.	Untuk kewajaran biaya dinilai wajar dan banyak pelayanan yang tidak dikenai pungutan biaya, hasil capaian ini untuk dipertahankan dan ditingkatkan karena sedikit lagi bisa mencapai Sangat Baik Peningkatan Pengawasan langsung saat petugas memberikan pelayanan maupun melalui CCTV Membuat tampilan informasi tentang biaya/tarif yang lebih jelas, tegas dan meluas (termasuk apabila tanpa biaya/gratis) Menampilkan informasi terkait produk layanan lebih jelas dan meluas dengan dipajang diruang layanan, pamflet, brosur, media sosial, media cetak, media massa Membuat tampilan lebih menarik sehingga lebih mudah diketahui dan dipahami Menegaskan kepada petugas tentang pelayanan yang tanpa biaya maka tidak boleh meminta biaya apapun sama sekali Menyusun / mengembangkan system / aplikasi yang dapat menampilkan seluruh biaya/tarif pelayanan Monev dan binwas secara berkala dan berjenjang	Jk. Pendek: Semester 1 2021 (a, b, c, e, f, h) Jk. Menengah: Semester 2 2021 (d) Jk. Panjang: Tahun 2022 (g)	Biro Organisasi dan PD/Biro/UPT terkait
9.	Penanganan Pengaduan	3,54 (88,48) A (Sangat Baik)	- Secara umum sudah Sangat Baik karena telah berada pada kategori Sangat Baik dengan nilai 3,54 (88,48) dan perlu untuk dipertahankan - Pengelolaan Pengaduan sudah bagus - Informasi pengaduan agar lebih jelas	c. d. e.	pengaduan yang mencakup informasi dan konsultasi secara umum telah tersedia dan berjalan baik, untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan Meminta unit kerja menyiapkan SK pengelola pengaduan dan diletakkan di ruang layanan Meminta unit kerja mempublikasikan tentang pengelolaan pengaduan, yang terdiri dari media pengaduan, pejabat pengelola pengaduan, alur pengaduan, dan jangka waktu penyelesaian pengaduan pengaduan pejabat pengelola pengaduan pada tiap unit kerja agar dapat standby di ruang layanan penanganan pengaduan yang responsive pada berbagai kanal / media pengaduan termasuk LAPOR-SP4N	Jk. Pendek: Semester 1 2021 (a, b, c, d, e, f) Jk. Menengah: Semester 2 2021 (d) Jk. Panjang: Tahun 2022 (g)	Biro Organisasi dan PD/Biro/UPT terkait



BABIII

PENUTUP



3.1. Kesimpulan

Tujuan dilaksanakannya Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah untuk mengetahui dan mempelajari sejauh mana tingkat kinerja unit pelayanan publik serta sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi kepada unit pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat atas pelayanan yang dilakukan sesuai hasil SKM yang dilaksanakannya. SKM dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan yang diberikan, dapat dilakukan melalui kuesioner atau tanya jawab langsung dengan responden terhadap tingkat kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh unit pelayanan publik. Melalui Data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atau kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, serta untuk mengetahui tingkat kinerja Aparatur penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat. Hasil dari SKM berupa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori nilai sebagai berikut:

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	KURANG BAIK
3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	В	BAIK
3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	А	SANGAT BAIK

Adapun beberapa kesimpulan dari hasil rekapitulasi Laporan SKM Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemprov Kalbar Tahun 2020 adalah 84,18 dengan kategori Baik (B). Nilai ini meningkat 0,71 poin dari tahun sebelumnya (2019) yaitu 83,47.
- Untuk Tahun 2020, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah (100 %), 9 (sembilan) Biro (100 %), dan 31 (tiga puluh satu) UPT (57,41 %) di lingkungan Pemprov Kalbar yang melaksanakan SKM.

- SKM Tahun 2020, sebanyak 14 (empat belas) UPP atau 16,09 % meraih IKM dengan kategori A (Sangat Baik), yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (92,93), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (92,80), Dinas Komunikasi dan Informatika (91,13), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (90,82), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (90,13), Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan (89,44), Dinas Sosial (88,88), Dinas Perkebunan (88,86), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (88,58), Biro Administrasi Pembangunan (88,52), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (88,47), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (88,43), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (88,32), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (88,31).
- 4) Mayoritas UPP Pemprov Kalbar yaitu sebanyak 71 (tujuh puluh satu) atau 81,61 % mendapatkan IKM pada kategori Baik (B) dengan rentang nilai 76,61 88,30. Namun masih terdapat 2 (tiga) UPP atau 2,30 % yang mendapatkan kategori Kurang Baik (C) dan tidak ada UPP atau 0 % yang mendapatkan kategori Tidak Baik (D).
- 5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemprov Kalbar dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2015, nilai IKM Pemprov Kalbar berada pada posisi 74,32 dan meningkat 2,17 poin menjadi 76,49 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 6 poin dari tahun 2016, menjadi 82,49. Pada tahun 2018, nilai IKM Pemprov Kalbar adalah 83,22 dan terjadi peningkatan sebesar 0,73 poin dari tahun 2017. Nilai IKM Pemprov Kalbar pada tahun 2019 adalah 83,47 dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan 0,71 poin sehingga nilai IKM Pemprov Kalbar Tahun 2020 adalah 84,18.
- 6) Dari hasil nilai IKM per unsur layanan, seluruh unsur pelayanan telah berada pada kategori Baik (B) bahkan terdapat unsur pelayanan yang mendapatkan kategori Sangat Baik (A). Dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan, Penanganan Pengaduan merupakan unsur pelayanan yang mendapatkan nilai persepsi kepuasan tertinggi dari masyarakat/responden dengan nilai 3,54 dan berada pada kategori Sangat Baik (A). Adapun untuk unsur pelayanan terendah yaitu Sarana Prasarana dengan nilai 3,24 yang berada dalam kategori Baik (B).
- 7) Beragamnya data profil masyarakat / responden dengan jumlah total 4.901 (empat ribu sembilan ratus satu) orang yang mengisi kuesioner SKM untuk mewakili para penerima layanan. Hal ini dilihat dari jumlah total responden yang cukup banyak banyak, juga terlihat dari beragamnya latar belakang responden, baik itu dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, maupun pekerjaan.

- 8) IKM rata-rata Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah 83,46 dengan kategori Baik
- 9) Dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, seluruhnya (100 %) telah menyampaikan Laporan SKM Tahun 2020.
- 10) Nilai rata-rata IKM Kabupaten/Kota se-Kalbar pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,60 poin dibandingkan tahun 2019 dari 82,86 (2019) menjadi 83,46 (2020). Hal ini disebabkan oleh meningkatnta nilai IKM pada beberapa Kabupaten msekipun terdapat pula Kabupaten/Kota yeng mengalami penurunan nilai IKM pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2020. Meskipun demikian, dalam 5 (lima) tahun terkahir, nilai rata-rata IKM Kabupaten/Kota se-Kalbar sejak tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 dengan nilai 75,53 meningkat 2,05 poin menjadi 77,58 pada tahun 2016, setelah itu meningkat 2,5 poin menjadi 80,08 pada tahun 207, kemudian meningkat 3,49 poin menjadi 83,57 pada tahun 2018, dan terjadi sedikit penurunan sebesar 0,71 poin sehingga nilai rata-rata IKM Kabupaten/Kota se-Kalbar pada tahun 2019 menjadi 82,86. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan 0,60 pon sehingga nilai rata-rata IKM Kabupaten/Kota se-Kalbar pada tahun 2020 menjadi 83,46.
- 11) Nilai IKM tertinggi untuk Kabupaten/Kota se-Kalbar Tahun 2019 berada pada Kota Pontianak dengan nilai IKM 88,53 dengan kategori Sanagt Baik (A). Kota Pontianak juga menjadi Kabupaten/Kota se-Kalbar yang memiliki UPP terbanyak dalam hal pelaksanaan dan pelaporan SKM yaitu sebanyak 98 (Sembilan puluh Delapan) UPP yang terdiri dari Perangkat Daerah, UPT, Kecamatan, dan Puskesmas.
- 12) Nilai IKM Provinsi Kalbar Tahun 2020 yang merupakan nilai rata-rata IKM Pemprov Kalbar (84,18) dan nilai IKM Kabupaten/Kota (83,46) adalah 83,82. Nilai ini mengalami peningkatan 0,65 poin dari tahun 2019, yang disebabkan oleh meningkatnya nilai rata-rata IKM Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Kalbar. Dalam 5 (lima) tahun terkahir, nilai IKM Provinsi mengalami peningkatan dari semula 74,93 pada tahun 2015 hingga pada tahun 2020 meningkat menjadi 83,82.

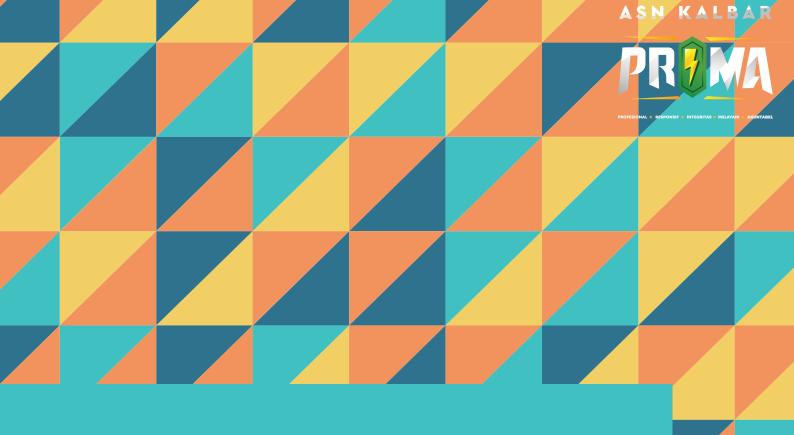
3.2. Saran / Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Barat, dapat disampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upayaupaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan.
- 2) Menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dinilai rendah oleh responden, dengan upaya tindak lanjut jangka pendek dan menengah serta melakukan upaya-upaya percepatan pelayanan seluruh jenis layanan di unit kerja.
- 3) Terkait dengan hasil penilaian per unsur pelayanan dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Memberikan informasi terkait pengelolaan pengaduan secara lebih jelas dan lengkap;
 - b) Mempertahankan dan meningkatkan penanganan pengaduan yang baik;
 - c) identifikasi faktor apakah yang membuat kecepatan pelayanan mendapatkan nilai terendah dibanding unsur lainnya, apakah dari prosedurnya atau petugasnya,
 - d) Mempertahankan dan meningkatkan pencantuman nominal biaya maupun pernyataan pelayanan gratis / tanpa biaya untuk pelayanan yang berbayar maupun pelayanan yang gratis (tanpa biaya);
 - e) penempatan petugas yang sesuai untuk pelayanan;
 - f) pemberian pelatihan secara rutin dan berkelanjutan mengenai pelayanan publik maupun terkait tugas pokok dan fungsi serta perkembangan teknologi informasi kepada petugas pelayanan;
 - g) pemberian insentif khusus untuk petugas pelayanan;
 - h) pemberian reward / apresiasi untuk petugas pelayanan terbaik;
 - i) pemberian punishment / hukuman untuk petuga pelayanan yang buruk;
 - j) melakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang;
 - k) Melakukan pembahasan tentang penyederhanaan persyaratan pelayanan;
 - I) Memberikan kemudahan untuk mengakses pelayanan;
 - m) Meningkatkan tampilan informasi tentang persyaratan pelayanan yang lebih jelas dan meluas, misalnya dipajang di ruang layanan, pamflet, brosur, media sosial, media cetak, media massa, dll.
 - n) Melakukan pembahasan tentang penyederhaan proses dan prosedur pelayanan termasuk penyerdehaan alur SOP;
 - o) tidak berbelit-belit dalam pelayanan;
 - p) mempermudah prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - q) memaksimalkan penggunaan sarana prasaranan yang ada;

- r) mengadakan sarana prasaranan yang belum tersedia atau belum memadai;
- s) meningkatkan kualitas dan kenyamanan sarana dan prasarana terkait pelayanan publik misalnya perbaikan/renovasi gedung atau pembangunan ruang khusus pelayanan;
- t) Meningkatkan kenyamanan ruang tunggu/ruang pelayanan seperti penyediaan pendingin udara, sofa / kursi empuk, bahan baca, internet gratis, air minum / permen, televisi, ruang laktasi, tempat bermain anak, tempat sholat, tempat parkir, dll;
- u) Memperhatikan fasilitas dan pelayanan untuk pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti prioritas layanan, ram, jalur landa, tambatan, kursi roda, toiet khusus, parkir khusus, dll;
- v) pembangunan mal pelayanan publik;
- 4) Melakukan bimbingan, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Perangkat Daerah/Biro/UPT di Lingkungan Pemprov Kalbar maupun kepada seluruh Bagian Organisasi beserta beberapa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalbar terkait pelaksanaan dan penyusunan laporan SKM pada triwulan ke-2 s.d. triwulan ke-4 setiap tahunnya untuk meningkatkan jumlah UPP yang menyampaikan laporan SKM maupun meningkatkan kualitas dari laporan SKM tersebut.. Hal ini juga untuk melihat bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Biro/UPT terhadap hasil SKM setiap tahunnya.
- 5) Melaksanakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan SKM dan Penyusunan Laporan SKM pada triwulan ke-3 setiap tahunnya untuk meningkatkan jumlah UPP yang menyampaikan laporan SKM maupun meningkatkan kualitas dari laporan SKM tersebut.
- 6) Meminta Kabupaten/Kota se-Kalbar agar seluruh UPP nya dapat melaksanakan dan menyampaikan laporan SKM.
- 7) Menyurati seluruh Perangkat Daerah/Biro/UPT di Lingkungan Pemprov Kalbar maupun kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Kalbar terkait pelaksanaan SKM dan penyampaian laporan SKM.
- 8) Untuk penyusunan Laporan SKM Provinsi Kalbar kedepannya dapat diubah waktu pelaksanaannya menjadi dilaksanakan mulai triwulan ke-3 dan diharapkan dapat diselesaikan pada triwulan ke-4 tahun berjalan yang sama antara tahun pelaksanaan SKM dengan tahun penyusunan laporannya.







Kantor Gubernur Kalimantan Barat

Gedung B (Gedung BKD) Lantai 2

Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalbar 78124

Telp. (0561) 736541 ext. 236 Faks. (0561) 730062

Whatsapp: +62 895 1851 0075

website: www.kalbarprov.go.id

biroorganisasi.kalbarprov.go.id

organisasi.kalbarprov.go.id

e-mail: organisasi@kalbarprov.go.id

tatalaksana.org@gmail.com

instagram: eorganisasi_kalbar

facebook: BiroOrganisasi Kalbar

youtube : Biro Organisasi Kalbar